

Peluang & Tantangan
Usaha **Perternakan**
di Aceh



Peluang & Tantangan Usaha Perternakan di Aceh

Peluang & Tantangan
Usaha **Perternakan**
di Aceh



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu - Aceh
email: sefabumipersada@gmail.com
Telp. 085260363550



Editor: Jamilah, SP,MP

Ghazali Syamni
Ikramuddin
Bambang Ali Nugroho
Nuhfil Hanani



RINGKASAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model kemitraan rantai pasok dan rantai nilai usaha peternakan rakyat serta pola pengembangan peternakan rakyat dalam konteks pembangunan ekonomi lokal berbasis peternakan di Aceh. Tujuan khusus penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil tujuan penelitian tahun pertama yaitu mengkaji kendala dan peluang pengembangan kemitraan antara peternak dengan pelaku bisnis, memformulasikan model kemitraan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal, dan memberikan alternatif kebijakan pengembangan peternakan secara terpadu dan berdaya saing serta layak dikembangkan di Aceh.

Evaluasi kinerja program pengembangan peternakan dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan informasi dari peternak, pelaku bisnis dan pemerintah daerah serta data-data sekunder yang relevan. Melalui analisis SWOT dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal pada kelembagaan kemitraan usaha peternakan rakyat mencakup analisis rantai pasok dan analisis rantai nilai dengan tinjauan pada aspek sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran produk ternak rakyat. guna menemukan strategi pengembangan sebagai dasar merumuskan model kemitraan dan alternatif kebijakan pengembangan kemitraan yang layak dikembangkan di Aceh.

Hasil penelitian tahun pertama memberikan informasi bahwa usaha peternakan rakyat di Aceh terbentuk secara sinergi pada beberapa pola kemitraan baik pada aspek penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Meskipun pola tersebut menciptakan peluang pengembangan peternakan di tingkat peternak, namun masih dihadapi beberapa kendala dan tantangan dalam pengembangannya sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan model kemitraan yang layak diterapkan di Aceh melalui analisis simulasi.

Keberadaan kelembagaan lokal seperti Rumah Potong Hewan (RPH), asosiasi peternakan, pasar hewan, pos kesehatan hewan di tingkat kecamatan dan pasar daging tradisional khususnya pada usaha peternakan sapi potong cukup signifikan dan berkontribusi positif sehingga mampu mengurangi praktek-praktek pemasaran yang tidak fair yang dapat merugikan peternak sapi potong. Namun hal ini belum berlaku bagi usaha peternakan yang lain di Aceh.

Usaha peternakan ayam petelur binaan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur tidak berjalan dengan baik, bahkan sejumlah kandang terlihat kosong karena peternak tidak mampu mengantisipasi kenaikan harga pakan dan fluktuasinya harga telur ayam, kurangnya pembinaan dari instansi terkait dan manajemen pengelolaan yang tidak terstruktur. Prospek pasar telur ayam menunjukkan bahwa permintaan telur ayam masih sepenuhnya dipasok dari Provinsi Sumatera Utara.

Usaha peternakan ayam broiler berkembang dengan pola kemitraan dan mampu memenuhi 80% dari permintaan daging ayam. Usaha peternakan itik memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan secara mandiri karena kenaikan harga telur itik mampu mengantisipasi kenaikan harga pakan, pola makan itik yang jauh lebih sedikit dan bebas berinteraksi dengan lingkungan dapat meringankan modal usaha.

PRAKATA

Puji & syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian yang berjudul “Model Kemitraan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Usaha Peternakan Rakyat Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Di Aceh”.

Penelitian ini terlaksana dengan adanya dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Program Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Hibah Pekerti) sehingga penulis mampu berkontribusi positif dalam pengembangan usaha peternakan rakyat di Aceh melalui kerjasama penelitian antara Universitas Malikussaleh dengan Universitas Brawijaya.

Atas terlaksananya penelitian ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Moch Munir, sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Bapak Dr. Apridar, S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Bapak Ir. Bambang Ali Nugroho, MS, DAA, PhD dan Bapak Prof..Dr..Ir..Nuhfil Hanani AR, MS sebagai Tim Peneliti Mitra (TPM).
4. Bapak Wahyuddin, S.E.,M.Si,Ak, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Yulius Dharma, S.Ag.,M.Si, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikusssaleh.
6. Seluruh staf pengajar dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam penelitian.

Laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, mohon kritik dan saran demi penyempurnaan penulisan ini.

Aceh Utara, 17 Desember 2015

Penulis,

Ghazali Syamni, SE., M.Sc
NIP. 19730706 200312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Dasar Teoritis	9
2.1.1 Permintaan dan Penawaran Daging dan Telur	9
2.1.2 Karakteristik dan Potensi Sumberdaya Peternakan	10
2.1.3 Pentingnya Kemitraan Usaha Peternakan Rakyat	11
2.2 Pendekatan Kritis dan Konseptual yang Digunakan	12
2.3 Studi Pendahuluan	15
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
3.1 Tujuan Penelitian.....	17
3.2 Manfaat Penelitian.....	17
4. METODE PENELITIAN	19
4.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian	19
4.2 Metode Penentuan Lokasi dan Responden Penelitian	19
4.3 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data	20
4.4 Analisis Data	20
4.5 Roadmap Penelitian	22
5. HASIL YANG DICAPAI	23
5.1 Perkembangan Usaha Peternakan Rakyat Di Aceh	23
5.1.1 Usaha Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Aceh Besar	23
5.1.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Aceh Timur	26
5.1.3 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kabupaten Aceh Utara ...	27
5.1.4 Usaha Peternakan Itik Di Kabupaten Aceh Utara	29
5.2 Peraturan pemerintah tentang kelembagaan Kemitraan Usaha ...	30
5.3 Kendala dan Peluang Sektor Peternakan Rakyat di Aceh	31

	Halaman
6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	38
7. KESIMPULAN DAN SARAN	40
7.1 Kesimpulan.....	40
7.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Potensi Investasi Sektor Peternakan Provinsi Aceh, Tahun 2007-2011	11
4.1	Jenis Ternak dan Lokasi Penelitian	19
5.3	Data Kelompok Tani Ternak Sapi Di Kabupaten Aceh Besar ..	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka pemikiran penelitian.....	14
4.1	Model Fishbone Pengembangan AUDT-A.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan adalah sektor riil yang paling dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Aceh. Usaha bidang peternakan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak agar Aceh tidak lagi memiliki ketergantungan pada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan ternak dan telur ayam. Namun sampai saat ini usaha itu belum memberikan hasil yang optimal. Aceh masih saja memasok daging dan telur dari provinsi lain. Khusus harga daging di Aceh sangat tinggi, bahkan disebut-sebut tertinggi di dunia. Rendahnya produksi dan produktivitas ternak karena pengembangannya yang belum berorientasi bisnis. Masyarakat masih memandang usaha peternakan ini sebagai usaha sampingan dan hanya memelihara beberapa ekor ternak saja sehingga harganya tetap melambung karena persediaan ternak lokal yang sangat minim.

Mahalnya harga daging sapi di Aceh, terutama saat menjelang *Meugang* Ramadhan dan dua hari raya, ternyata tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan para peternak. Bahkan, sangat sulit untuk menemukan orang Aceh yang mengelola peternakan secara profesional, meski hampir seluruh wilayah Aceh sangat potensial untuk lahan peternakan. Uniknya, Aceh tak pernah kekurangan daging sapi. Meski di pasar, juga

terdapat daging sapi yang berasal dari sapi-sapi di luar Aceh. Namun keberadaan daging sapi aceh tetap mencukupi bagi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 1960-1980-an, Aceh terkenal sebagai daerah sentra produsen sapi dan kerbau terbesar di pulau Sumatera. Saat itu, sebanyak 30 persen sampai 40 persen produksi ternak sapi dan kerbau dari Aceh, memenuhi kebutuhan daging di Pulau Sumatera, terutama Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun saat ini sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan daging *meugang* puasa dan lebaran (Rp 130.000-140.000/kg), pedagang daging di Aceh harus mengimpor daging dari Australia dan memasok sapi impor melalui Lampung. Penurunan produksi ternak besar (sapi, kerbau dan kambing), menurutnya, terjadi sejak kondisi keamanan Aceh terganggu mulai tahun 1990 sampai tahun 2005. Peternak tidak lagi nyaman melakukan aktivitasnya. Pertambahan ternak tetap ada, tapi persentasenya tidak lagi setinggi pada masa kejayaannya tahun 1960-1980.

Populasi ternak sapi di Aceh masih sangat banyak dan tidak sepentasnya harga daging sapi pada *meugang* puasa dan lebaran di atas Rp 120.000/kg. Karena di daerah lain misalnya Sumut dan Padang yang jumlah penduduknya melebihi Aceh, harga daging selalu berkisar antara Rp 80.000-Rp 100.000/kg, termasuk menjelang hari-hari besar Islam. Melonjaknya harga daging di Aceh pada waktu tertentu, bukan karena semata-mata melonjaknya permintaan. Tapi lebih disebabkan tingginya biaya pemeliharaan sapi di Aceh sejak terjadi konflik. Selama konflik, pertumbuhan sapi Aceh sangat lamban, sudah jarang ditemukan sapi Aceh yang bertubuh gemuk dan besar.

Berdasarkan laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh (2010), populasi sapi aceh dalam tahun 2009 adalah 590.315 ekor (88,11%) dari total populasi sapi di Aceh yaitu 669.996 ekor yang menyebar pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Populasi terbesar sapi aceh meliputi Kabupaten Aceh Timur (100.992 ekor), Kabupaten Aceh Utara (97.394 ekor), dan Kabupaten Aceh Besar (96.789 ekor). Populasi tahun 2011 sebesar 731.645 ekor (Tabel 1.1). Bobot sapi Aceh muda betina sekitar 128+30 kg, dan jantan 145+37 kg. Sapi aceh telah tersebar secara meluas ke seluruh

wilayah Aceh, sebagian kabupaten dalam wilayah Sumatera Utara, seperti Binjai dan Karo, juga dipasarkan di wilayah Bonjol dan Talu Provinsi Sumatera Barat (Diskeswannak Aceh, 2012).

Komoditas unggulan sektor peternakan di Kabupaten Aceh Utara adalah ayam buras sedangkan posisi kedua adalah sapi, kerbau. Jumlah ternak sapi mencapai 135.677 ekor, kerbau 11.460 ekor, kambing 113.228 ekor, domba 20.323 ekor, ayam buras 2.664.016 ekor, ayam pedaging 463.909 ekor dan itik sebanyak 556.114 ekor (Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Utara, 2013). Usaha peternakan non ayam ras didominasi oleh usaha rumah tangga yang pada umumnya merupakan usaha sampingan berskala kecil, tidak intensif dan dengan teknologi tradisional.

Program agribisnis ayam petelur di Kabupaten Aceh Timur telah mampu menghasilkan 55 ribu butir telur ayam per hari. Program agribisnis ayam petelur di Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu program unggulan daerah ini yang berdampak positif bagi perkembangan perunggsan khususnya ayam petelur, terbukanya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan sebagai inovasi baru yang dapat meningkatkan kapasitas SDM peternakan. Program ini memotivasi masyarakat untuk membuka usaha serupa secara pribadi dan berkelompok. Untuk itu, Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai sentra pengembangan agribisnis ayam petelur di Aceh.

Tabel 1.1 Potensi Investasi Sektor Peternakan Provinsi Aceh, Tahun 2007-2011

No.	Indikator	Satuan	Capaian per Tahun				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Peningkatan Populasi		17.009.254	14.809.861	14743727	16.112.151	17.913.901
	a. Sapi Perah	Ekor	33	32	35	37	39
	b. Sapi Potong	Ekor	639.828	641.093	669.996	701.076	731.645
	c. Kerbau	Ekor	297.136	280.662	290.772	306.179	325.666
	d. Kuda	Ekor	3.117	3.243	3.362	3.683	4.006

	e. Kambing	Ekor	675.879	697.426	807.506	886.468	981.776
	f. Domba	Ekor	134.577	157.081	193.852	221.402	247.721
	g. Babi	Ekor	227	333	302	323	333
	h. Ayam Buras	Ekor	11.125.945	8.904.869	7.999.580	8.189.872	8.928.207
	i. Ayam Ras Petelur	Ekor	137.950	181.887	232.364	357.442	408.019
	j. Ayam Ras Pedaging	Ekor	1.399.808	1.346.308	1.836.413	2.382.329	2.892.495
	k. Itik	Ekor	2.594.754	2.596.927	2.709.545	3.063.340	3.393.994
2	Produksi Daging		27.220.498	19.042.312	21.354.863	22.466.907	23.537.333
	a. Sapi	Kg	6.500.496	7.354.490	7.613.601	7.914.224	8.309.997
	b. Kerbau	Kg	1.924.289	2.004.119	2.303.176	2.519.689	2.669.583
	c. Kambing	Kg	1.974.022	1.378.688	1.333.075	1.412.672	1.499.027
	d. Domba	Kg	115.698	101.180	162.647	179.580	190.663
	e. Ayam Buras	Kg	10.760.157	3.415.604	3.847.072	4.041.864	4.212.458
	f. Ayam Ras Petelur	Kg	87.513	323.338	431.681	453.265	475.921
	g. Ayam Ras Pedaging	Kg	3.392.825	3.628.554	4.746.041	4.981.945	5.170.081
	h. Itik	Kg	2.465.498	836.339	917.570	963.668	1.009.663
3	Produksi Telur		23.061.726	13.058.370	13.804.021	14.501.980	15.273.279
	a. Ayam Buras	Kg	12.597.200	4.425.176	3.993.321	4.194.995	4.446.746
	b. Ayam Ras Petelur	Kg	821.521	967.005	1.868.207	1.961.618	2.059.699
	c. Itik	Kg	9.643.005	7.666.189	7.942.493	8.345.367	8.766.834
4	Produksi Susu		31.360	31.360	33.640	33.640	33.640
	a. Sapi Perah	Kg	31.360	31.360	33.640	33.640	33.640
5	Konsumsi		35.556.147	47.797.905	30.529.460	33.436.917	36.740.866
	a. Daging	Kg/Tahun	19.929.371	25.859.473	18.094.216	20.291.139	22.482.268
	b. Telur	Kg/Tahun	15.596.984	21.908.640	12.405.452	13.113.820	14.226.640
	c. Susu	Kg/Tahun	29.792	29.792	29.792	31.958	31.958

Sumber : (Diskeswannak Aceh, 2012).

Revolusi peternakan ayam dimungkinkan oleh inovasi teknologi genetik (ayam ras) dan kelembagaan (sistim agribisnis) yang dipelopori oleh perusahaan multinasional. Teknologi ayam ras dengan sistem inovasi budidaya intensif adalah teknologi impor yang dibawa oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional tidak saja bergerak dalam usaha produksi bibit (DOC) dan pabrik pakan (segmen hulu) walau dalam skala terbatas untuk memperluas cakupan dan skala usahanya. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut mengembangkan pola-pola kemitraan usaha budidaya dengan peternak kecil rumah tangga.

Untuk mendukung program peningkatan produksi daging dan populasi ternak secara menyeluruh, Pemerintah Aceh melalui instansi terkait telah mengalokasikan anggaran antara Rp 90- Rp 100 miliar, tapi produksi ternak sapi lokal tetap saja belum memuaskan masyarakat. Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian ditetapkan bahwa sapi aceh sebagai rumpun ternak sapi nasional. Guna mendukung program ini, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan (Dinkeswannak) Aceh telah menyusun program pengembangan dan pelestarian plasma nutfah sapi aceh. Untuk mendukung program ini, Dinkeswannak menjalankan program perbaikan mutu genetik, peningkatan produksi dan produktivitas sapi aceh. Untuk tahun 2012, Dinkeswannak sudah membangun satu unit laboratorium prosesing sperma sapi Aceh dan sudah beroperasi di Saree, dan didanai oleh APBN untuk menghasilkan sperma sapi Aceh terbaik dan kemudian akan disuntikkan kepada betina-betina akseptor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi sapi, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternak sapi. Peternak berada di ambang batas sejahtera jika memiliki minimal 4 ekor sapi.

Kebanyakan pengusaha di Aceh lebih tertarik pada jasa kontraktor daripada usaha-usaha produksi seperti sektor peternakan. Padahal bila sektor peternakan ini dikelola secara serius dengan konsep bisnis, tentu dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Kerja sama

dengan berbagai stakeholder, merupakan kunci untuk keberhasilan sebuah program. Pemerintah akan membina dan memberikan stimulan dengan memfasilitasi atau menyediakan beberapa fasilitas publik yang tidak sanggup disediakan oleh masyarakat. Karenanya, pihak swasta diharapkan dapat berperan maksimal dalam menyukseskan agenda pembangunan, termasuk bidang peternakan.

Usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh selama ini, masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang sangat kecil, sehingga dampak ekonomi juga sangat kecil. Masyarakat belum menjadikan peternakan menjadi mata pencarian utama, melainkan masih sebatas sampingan. Untuk mengubah konsep tersebut, tentu membutuhkan kerja keras dan terintegrasi dengan berbagai instansi terkait lainnya seperti perdagangan, koperasi, lembaga keuangan, dan penyuluhan. Kemitraan merupakan langkah sukses membangun peternakan yang mayoritasnya berskala kecil. Integrasi dengan pengusaha swasta dibidang peternakan perlu digalang dalam rangka pembelajaran perubahan peternak tradisional menuju agribisnis peternakan.

Pertanian termasuk peternakan adalah sektor riil yang paling dekat dengan masyarakat Aceh. Usaha bidang peternakan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Mengelola sektor peternakan secara profesional menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyatnya. Saat ini tercatat sebanyak 200.000 kepala keluarga di Aceh, memelihara lebih dari 700.000 ekor sapi dan lebih dari 350.000 ekor kerbau. Hanya saja mereka bukan termasuk peternak profesional, sehingga tingkat kesejahterannya pun masih rendah. Petani ternak itu baru bisa berada di ambang batas sejahtera jika mereka memiliki minimal 4 ekor sapi,

Dengan lahan yang subur dan luas, sektor agribisnis peternakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam rangka memandirikan ekonomi Aceh di masa akan datang. Hanya saja, selama ini sektor agribisnis ini, belum dikelola secara serius, sehingga lahan gembalaan yang subur, terkesan sia-sia dan belum berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Usaha peternakan bersifat sampingan dan skala kecil sehingga dampak ekonomi juga sangat kecil.

Permasalahan lain yang dihadapi sehingga lambatnya perkembangan sektor peternakan di Aceh, adalah terbatasnya investasi swasta yang bergerak di sektor peternakan. Investasi belum menunjukkan pengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Aceh, mengingat sub sektor peternakan merupakan sektor usaha yang beresiko, karena itu kurang menarik bagi perbankan. Padahal bila sub sektor peternakan ini dikelola secara serius dengan konsep bisnis, tentu dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Solusinya adalah perlu menjalin pola kemitraan dan kerja sama secara sinergi antara peternak, pelaku bisnis dan pemerintah daerah. Selain memiliki kemampuan teknis seperti pemilihan lokasi, pola kemitraan juga berperan dalam penyediaan bibit unggul dan pemeliharaan, menjalankan usaha dan bisnis, serta hubungannya dengan permodalan, termasuk pemasarannya.

Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian serius untuk mengelola sub sektor peternakan ini, mulai dari penyediaan bibit hingga pemasaran yang berorientasi ekspor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 dituangkan beberapa tindakan prioritas untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, peningkatan peran balai inseminasi buatan daerah (BIBD) untuk produksi sperma beku sapi Aceh dan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) dalam peningkatan populasi dan produksi. Kedua, optimalisasi fungsi BPTU sapi aceh Indrapuri. Ketiga, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular. Keempat, pengembangan kawasan peternakan yang difokuskan pada beberapa kawasan potensial dan sesuai dengan karakteristik daerah, seperti Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Bireuen. Kelima, pelestarian dan pengembangan plasma nutfah sapi aceh yang didukung oleh regulasi. Keenam, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas peternakan serta peternak. Ketujuh, pengembangan kelembagaan petani peternak. Salah satu poin penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 adalah

memfokuskan pencapaian swasembada daging dan telur (Bappeda Aceh, 2012).

Dalam rangka program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Aceh adalah mengaktifkan peternakan, peningkatan kesehatan hewan, pengembangan kawasan, integrasi ternak dengan tanaman. Pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 104,9 miliar. Pada tahun 2011 anggaran yang dialokasikan lebih besar lagi mencapai Rp. 115 miliar. Untuk program peningkatan produksi daging dan populasi ternak secara menyeluruh, Dewan mengalokasikan anggaran antara Rp. 90 hingga Rp. 100 miliar, tapi produksi ternak sapi lokal tetap saja belum memuaskan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan yang tidak intensif merupakan salah satu faktor dari lambannya peningkatan produksi daging sapi lokal, dan pertambahan populasinya. Hendaknya usaha peternakan rakyat dikelola secara terpadu dan terintegrasi, dalam bentuk klaster-klaster bisnis. Kerja sama dengan dinas/instansi terkait sangat dibutuhkan sehingga Aceh dapat memutuskan ketergantungan pada Sumatera Utara dengan memfungsikan kawasan Sabang. Diharapkan upaya Aceh untuk mencapai swasembada daging dan telur akan berjalan secara terukur.

1.2 Perumusan Masalah

Usaha peternakan di Provinsi Aceh secara umum dilakukan secara turun temurun dalam skala rumah tangga. Sama seperti peternak lokal pada umumnya, peternak Aceh memanfaatkan usaha ternak sebagai tabungan dan belum seperti usaha peternakan skala industri. Meskipun demikian, usaha peternak lokal dengan skala kecil telah memberikan kontribusi yang relatif besar dalam menunjang kebutuhan daging di Provinsi Aceh.

Secara teoritis dan memang dapat dibuktikan, untuk peternakan sapi, peternak mestinya harus memiliki sapi minimal 7-10 ekor. Ini angka yang layak secara ekonomis. Namun fakta di lapangan menunjukkan, mayoritas peternak tidak sanggup memelihara sapi sebanyak itu. Umumnya mereka tidak punya tenaga untuk memberi pakan dan tidak punya lahan untuk menyediakan kandang bagi ternaknya. Usaha peternakan rakyat yang

dilakukan secara berkelompok dan bersistem kemitraan dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan usaha peternakan rakyat yang berdaya saing

Peluang investasi peternakan di Aceh sangat menarik. Aceh memiliki prospek untuk menjadi pengeksport ternak baik ke provinsi lain di Indonesia dan luar negeri. Jika sektor peternakan dikembangkan berbasis rakyat, dikelola secara profesional dan pembiayaan yang transparan, akan menjadikan Aceh sebagai kawasan investasi peternakan yang strategis. Prospek pemasaran hasil peternakan Aceh sangat tinggi mengingat tingginya permintaan daging dan harga daging di Aceh dibandingkan di daerah lainnya di Indonesia, terutama pada hari *Meugang* dan menjelang hari raya umat Islam. Di hari Meugang, harga daging sapi berkisar antara Rp. 130.000/kg hingga Rp. 140.000/kg. Padahal harga di Medan dan di Jakarta pada hari yang sama hanya berkisar Rp. 80.000/kg hingga Rp. 100.000/kg. Di Malaysia harga daging segar paling tinggi RM 15 (Rp. 37.500/kg) dan daging impor hanya RM 8 (Rp. 20.000/kg). Walaupun harga pakan ternak di Aceh relatif tinggi, tetapi kenaikan harga jual ternak lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga pakan ternak. Artinya para peternak masih dapat meraih keuntungan signifikan (Syakir dan Shabri, 2009).

Sektor Peternakan yang tidak teintegrasi antara peternak dengan pelaku bisnis peternakan membuat Aceh di rugikan. Pertama, tidak terjangkaunya harga daging menyebabkan rakyat Aceh sukar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi/gizi minimum. Kedua, mahalny daging di Aceh menyulitkan rakyat Aceh dalam berkorban. Ketiga, terjadinya gap pendapatan yang jauh antara peternak dengan pelaku bisnis. Keempat, mahalny harga daging di Aceh dibandingkan luar Aceh, akan mendorong pelaku pasar untuk memasok (mengimpor) daging dari luar Aceh. Bila ini terjadi perekonomian Aceh akan terganggu dan peternak akan sangat dirugikan. Rakyat Aceh semakin sulit memutus mata rantai ketergantungan perekonomiannya dari Medan dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Bila sektor peternakan Aceh mampu diberdayakan dan disinergikan dengan kebutuhan daerah, rakyat miskin akan berdaya. Dan ini membuka peluang kerja baru mulai dari peternak, pemasar pakan hingga ke pemasar

daging, juga membuka jalinan kerjasama sinergi dengan para pekerja ternak professional seperti dokter hewan.

BAB 7

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Dasar Teoritis

2.1.1 Permintaan dan Penawaran Daging dan Telur

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pangan hewani terutama daging dapat terpenuhi melalui ternak. Statistik Peternakan tahun 2010 memperlihatkan bahwa volume perdagangan daging Indonesia mengalami defisit pada tahun 2008, dimana volume ekspor hanya sebesar 61,5 ton dengan total nilai ekspor US\$ 11,39 ribu, sedangkan impor daging mencapai 45.709 ton dengan nilai impor sebesar US\$ 277.733 ribu atau mengalami defisit perdagangan sebesar US\$ 277.722 ribu. Pada tahun 2009 ekspor daging sangat kecil hanya 5,90 ton dengan nilai sebesar US\$ 20,71 dan impor daging sebesar 67.908 ton dengan nilai sebesar US\$ 293.1386 ribu. Impor juga terjadi dalam bentuk sapi bibit sebanyak 100 ekor, sapi bakalan sebanyak 657 ribu ekor, unggas relatif kecil sebanyak 2.687 ribu ekor. Untuk produk telur juga sama yaitu volume impor telur konsumsi mencapai 1.250 ton dengan nilai US\$ 51.172 ribu dan tidak ada ekspor sama sekali. Dengan ketergantungan kepada produk ternak dan bahan baku pakan impor untuk ternak komersial, maka sudah saatnya pemerintah dan masyarakat Indonesia memberikan perhatian yang lebih baik dalam pengembangan usaha peternakan rakyat.

Permintaan daging selama tahun 2008-2010 mengalami laju peningkatan sebesar 5,00 persen per tahun, yaitu dari 225.156 ton pada tahun 2000 meningkat menjadi 366.739 ton pada tahun 2010, sedangkan penawaran daging sapi mengalami laju penurunan sebesar -0,13 persen pertahun yaitu dari 203.164 ton pada tahun 2000 turun menjadi 200.576 ton pada tahun 2010 (Ilham *et al*, 2001). Terlebih pertumbuhan populasi sapi cenderung lambat dan tingginya laju pemotongan sapi, baik sapi betina maupun sapi jantan. Pada tahun 2007, konsumsi daging nasional mencapai 396.600 ton, sedangkan produksinya hanya 344.800 ton (Febyanti, 2008). Untuk itu, Kementerian Perdagangan menaikkan volume impor daging dan jeroan sapi serta sapi bakalan rata-rata di atas 10 persen (Statistik Peternakan, 2010).

Peluang pasar daging sapi di Aceh masih terbuka, hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan daging sapi terutama pada perayaan hari 'meugang' dan masih dimasukkannya ternak sapi dari beberapa daerah dan bahkan diimpor dari Australia guna memenuhi kebutuhan daging di Aceh. Peluang eskpor daging sapi ke Malaysia sangat terbuka karena permintaan di negeri jiran itu cenderung meningkat. Permintaan daging sapi untuk Negara Arab Saudi yang mengharuskan adanya label hala dan hal ini sangat memungkinkan dilakukan oleh Provinsi Aceh yang dikenal sebagai sala satu wilayah dengan mayaritas penduduk muslim.

2.1.2 Karakteristik dan Potensi Sumberdaya Peternakan

Usaha peternakan nasional hingga saat ini masih didominasi usaha peternakan rakyat. Jumlahnya mencapai lebih dari 95 persen dari jumlah keseluruhan peternak di Indonesia. Karakteristik usaha peternakan rakyat bercirikan oleh kondisi sebagai berikut (Aziz,1993): (1) skala usaha relatif kecil; (2) merupakan usaha rumah tangga; (3) merupakan usaha sampingan; (4) menggunakan teknologi sederhana; dan (5) bersifat padat karya dengan berbasis organisasi kekeluargaan. Pengembangan ternak secara integratif dengan pertanian setempat, serta dengan model kemitraan usaha baik dalam rantai pasok (*supply chan*) maupun rantai nilai (*value chan*) yang

tepat akan meningkatkan ketersediaan, distribusi dan daya saing produk ternak.

Sapi Aceh adalah ternak sapi yang hidup dan berkembang baik di Provinsi Aceh dan umumnya dimiliki oleh peternak di pedesaan. Sejak tahun 2011 Kementerian Pertanian mengeluarkan Surat keputusan bernomor : 2907/KPTS/OT 140/6/2011, yang menetapkan bahwa Sapi Aceh menjadi sapi rumpun nasional, setelah sapi madura dan sapi bali. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh (2010), populasi sapi aceh pada tahun 2009 sebanyak 590.315 ekor atau 88,11% dari total populasi sapi di Aceh sebanyak 669.996 ekor yang menyebar pada 23 kabupaten/kota di Aceh. Populasi terbesar sapi aceh meliputi Kabupaten Aceh Timur (100.992 ekor), Kabupaten Aceh Utara (97.394 ekor), dan Kabupaten Aceh Besar (96.789 ekor). Bobot Sapi Aceh muda betina sekitar 128+30 kg, dan jantan 145+37 kg. Sapi Aceh saat ini telah tersebar secara meluas ke seluruh wilayah Aceh, sebagian kabupaten dalam wilayah Sumatera Utara, seperti Binjai dan Karo, juga dipasarkan di wilayah Bonjol dan Talu Provinsi Sumatera Barat (Diskeswannak Aceh, 2012).

Komoditas unggulan sektor peternakan di Kabupaten Aceh Utara adalah ayam buras sedangkan posisi kedua adalah sapi, kerbau. Jumlah populasi ternak sapi mencapai 135.677 ekor, kerbau sebanyak 11.460 ekor, kambing sebanyak 113.228 ekor, domba sebanyak 20.323 ekor, ayam buras sebanyak 2.664.016 ekor, ayam pedaging sebanyak 463.909 ekor dan itik sebanyak 556.114 ekor (Pemkab Aceh Utara, 2013). Program agribisnis ayam petelur di Kabupaten Aceh Timur telah mampu menghasilkan 55 ribu butir telur ayam per hari. Program agribisnis ayam petelur ini merupakan salah satu program unggulan daerah yang berdampak positif bagi perkembangan perunggasan khususnya ayam petelur, terbukanya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan sebagai inovasi baru yang dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) peternakan. Program ini memotivasi masyarakat untuk membuka usaha serupa secara pribadi dan berkelompok. Untuk itu, Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai sentra pengembangan agribisnis ayam petelur di Aceh.

Potensi sumberdaya peternakan di Propinsi Aceh dapat dilihat dari ketersediaan luasan lahan perkebunan, padang penggembalaan, persawahan, dan kebun rumput yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Berdasarkan data BPS Aceh (2008) jumlah keseluruhan luasan lahan tersebut, di Provinsi Aceh mencapai 1.525.578 hektar. Potensi luasan lahan itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan hijauan ternak dengan pola sistem integrasi ternak dengan tanaman perkebunan. Selain itu, limbah pertanian seperti jerami padi yang melimpah yang selama ini dibakar oleh petani juga dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak.

2.1.3 Pentingnya Kemitraan Usaha Peternakan Rakyat

Selain terdapatnya potensi dan peluang, juga terdapat beberapa kendala dalam pengembangan peternakan sapi di Aceh. Munculnya penyakit reproduksi (seperti brucellosis) dan penyakit menular (seperti Surra, SE), bentuk usaha peternakan sebagian besar adalah peternakan rakyat, dan ketersediaan sapi bibit/bakalan masih rendah yang diakibatkan terjadinya pemotongan sapi betina produktif. Selain itu juga belum ada usaha produksi bibit unggas (ayam ras) dan belum adanya pabrik pakan ternak, potensi sumber daya alam (SDA) yang belum dimanfaatkan maksimal. Usaha sapi potong rakyat memiliki posisi yang lemah dan sangat peka terhadap perubahan (Yusja *et al.*, 2001). Kendala lainnya adalah masih dijumpainya flu burung sebagai ancaman utama dalam budidaya unggas di Aceh. Akibatnya, masyarakat Aceh masih mengalami ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk memenuhi sejumlah komoditi kebutuhan pokok mereka terutama daging dan protein hewani lainnya (Dinkeswannak Aceh, 2012).

Berbagai pemikiran maupun langkah-langkah operasional untuk mentransformasikan sektor produksi peternakan rakyat ke arah sistem yang berdaya saing sebenarnya telah banyak dikemukakan. Dewasa ini strategi yang dianut oleh Direktorat Jenderal Peternakan mencakup antara lain yang disebut sebagai konsolidasi peternakan rakyat dan kemitraan. Dalam konteks bisnis, pola kemitraan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas

dan produktivitas hubungan bisnis yang didukung oleh akses terhadap pasar, modal dan teknologi, serta peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen. Namun, sebagian besar investasi yang dilakukan lembaga donor internasional terfokus pada pengembangan kelembagaan tingkat nasional dan sangat sedikit sekali yang memberikan perhatian pada pengembangan kelembagaan lokal, padahal kelembagaan lokal paling dekat dengan masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan kelembagaan itu sendiri. Oleh karenanya, pengembangan kelembagaan lokal (*local institutional development*) menjadi sangat relevan dalam upaya pengembangan ekonomi lokal.

2.2 Pendekatan Kritis dan Konseptual yang Digunakan

Mengelola sektor peternakan secara profesional menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyatnya. Saat ini tercatat sebanyak 200.000 kepala keluarga di Aceh, memelihara lebih dari 700.000 ekor sapi dan lebih dari 350.000 ekor kerbau. Hanya saja mereka bukan termasuk peternak profesional, sehingga tingkat kesejahterannya pun masih rendah. Petani ternak itu baru bisa berada di ambang batas sejahtera jika mereka memiliki minimal 4 ekor sapi,

Dengan lahan yang subur dan luas, sektor agribisnis peternakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam rangka memandirikan ekonomi Aceh di masa akan datang. Hanya saja, selama ini sektor agribisnis ini, belum dikelola secara serius, sehingga lahan gembalaan yang subur, terkesan sia-sia dan belum berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha peternakan bersifat sampingan dan skala kecil sehingga dampak ekonomi juga sangat kecil.

Permasalahan lain yang dihadapi sehingga lambatnya perkembangan sektor peternakan di Aceh, adalah terbatasnya investasi swasta yang bergerak di sektor peternakan. Investasi belum menunjukkan pengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Aceh, mengingat sub sektor peternakan merupakan sektor usaha yang beresiko, karena itu kurang menarik

bagi perbankan. Padahal bila sub sektor peternakan ini dikelola secara serius dengan konsep bisnis, tentu dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat Solusinya adalah perlu menjalin pola kemitraan dan kerja sama secara sinergi antara peternak, pelaku bisnis dan pemerintah daerah. Selain memiliki kemampuan teknis seperti pemilihan lokasi, pola kemitraan juga berperan dalam penyediaan bibit unggul dan pemeliharaan, menjalankan usaha dan bisnis, serta hubungannya dengan permodalan, termasuk pemasarannya.

Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian serius untuk mengelola sub sektor peternakan ini, mulai dari penyediaan bibit hingga pemasaran yang berorientasi ekspor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 dituangkan beberapa tindakan prioritas untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, peningkatan peran balai inseminasi buatan daerah (BIBD) untuk produksi sperma beku sapi Aceh dan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) dalam peningkatan populasi dan produksi. Kedua, optimalisasi fungsi BPTU sapi aceh Indrapuri. Ketiga, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular. Keempat, pengembangan kawasan peternakan yang difokuskan pada beberapa kawasan potensial dan sesuai dengan karakteristik daerah, seperti Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Bireuen. Kelima, pelestarian dan pengembangan plasma nutfah sapi aceh yang didukung oleh regulasi. Keenam, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas peternakan serta peternak. Ketujuh, pengembangan kelembagaan petani peternak. Salah satu poin penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 adalah memfokuskan pencapaian swasembada daging dan telur (Bappeda Aceh, 2012).

Aspek Produksi

Sumber daya :

1. Kondisi Agroklimat
2. Sumberdaya genetik.
3. Sarana dan prasarana pendukung
4. SDM Pelaku Usaha Agrbisnis

Kelembagaan di tingkat peternak

1. Kelembagaan kelompok ternak
2. Asosiasi Peternak
3. Kelembagaan Pendukung
4. Kelembagaan penyuluhan
5. Kelembagaan saponak

Permasalahan :

1. Sistem usaha ternak tradisional
2. Skala usaha ternak kecil
3. Adopsi teknologi rendah
4. Produktivitas rendah.
5. Kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan belum terjamin
6. Kurangnya informasi dan akses pasar.

Aspek Kelembagaan :

1. Mengevaluasi kinerja program pengembangan usaha peternakan rakyat
2. Mengidentifikasi pola-pola kemitraan peternakan rakyat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
3. Menganalisis pendapatan peternak bersistem kemitraan dan hubungannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga peternak.
4. Menganalisis kelembagaan manajemen rantai pasok dan rantai nilai produk ternak rakyat
5. Mengkaji kendala dan peluang kemitraan usaha antara peternak dengan pelaku bisnis
6. Memformulasikan model kemitraan pengembangan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal.
7. Memberikan alternatif kebijakan pengembangan peternakan rakyat secara terpadu dan berdaya saing serta layak untuk dikembangkan di Aceh

Aspek Pemasaran :

Infrastruktur, Pengolahan, dan Pemasaran :

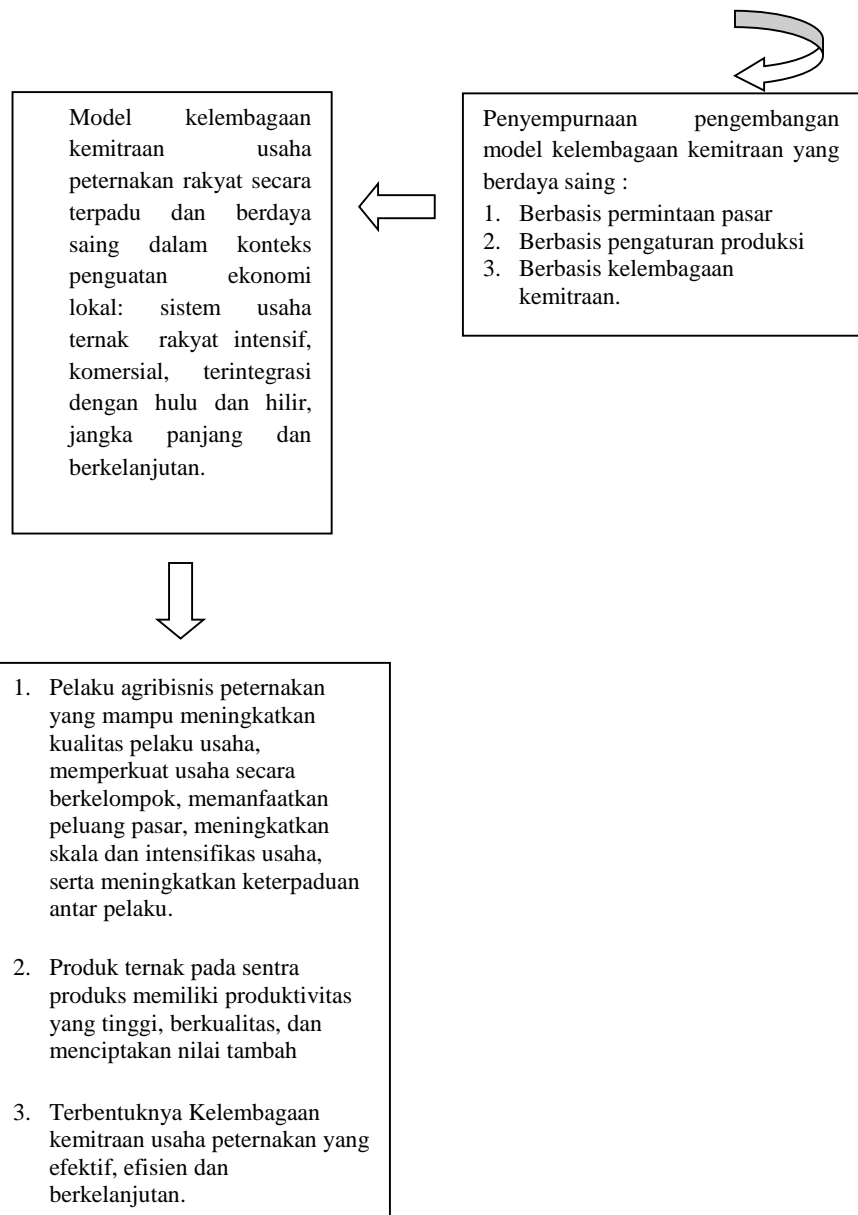
1. Pasar unggas, pasar tradisional, pasar modern.
2. Usaha pengolahan belum optimal.
3. Rendahnya kualitas produk sehingga belum mampu memenuhi dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen.
4. Sarana transportasi belum mendukung.
5. Standarisasi dan manajemen mutu belum mendukung

Kelembagaan di tingkat pemasaran :

Pedagang pengumpul, pedagang besar (broker), Perusahaan mitra, industri Pemasok Kuliner, industri Kuliner ritel, Pengecer.

Permasalahan :

1. Karakteristik pasar modern dan tradisional belum dipahami
2. Kelembagaan pelaku usaha rantai pasok belum efisien.
3. Koordinasi harga belum berdasarkan pelaku.
4. Sistem informasi rantai pasok belum berlaku.
5. Belum mampu mengembangkan rantai pasok menurut segmen pasar



Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian

Dalam rangka program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Aceh adalah mengaktifkan peternakan, peningkatan kesehatan hewan, pengembangan kawasan, integrasi ternak dengan tanaman. Pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 104,9 miliar. Pada tahun 2011 anggaran yang dialokasikan lebih besar lagi mencapai Rp. 115 miliar. Untuk program peningkatan produksi daging dan populasi ternak secara menyeluruh, Dewan mengalokasikan anggaran antara Rp. 90 hingga Rp. 100 miliar, tapi produksi ternak sapi lokal tetap saja belum memuaskan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan yang tidak intensif merupakan salah satu faktor dari lambannya peningkatan produksi daging sapi lokal, dan penambahan populasinya. Hendaknya usaha peternakan rakyat dikelola secara terpadu dan terintegrasi, dalam bentuk klaster-klaster bisnis. Kerja sama dengan dinas/instansi terkait sangat dibutuhkan sehingga Aceh dapat memutuskan ketergantungan pada Sumatera Utara dengan memfungsikan kawasan Sabang. Diharapkan upaya Aceh untuk mencapai swasembada daging dan telur akan berjalan secara terukur.

2.3 Studi Pendahuluan

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendasari rencana penelitian ini bahwa faktor daya saing produk klaster berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UKM di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe (Maryudi dan Ikramuddin. 2011.). Berdasarkan nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,753 atau 75,3% kelangsungan hidup usaha dipengaruhi secara signifikan oleh modal kerja, pengalaman usaha, jam kerja, dan tingkat pendidikan. *Variable independent* yang paling dominan terhadap kelangsungan hidup pedagang kaki lima adalah variabel Modal Kerja (X_1), dengan nilai $\beta = 0,334$ (Ikramuddin, 2012). Penelitian konseptual juga menjelaskan bahwa usaha kecil dan menengah di Indonesia mengalami

beberapa masalah antara lain persaingan, pengurusan dokumen ekspor yang lama, kualitas produk, hambatan ekspor, kelambatan transportasi, keterbatasan komunikasi, kelambatan memahami pengetahuan pasar internasional, prosedur administrasi impor, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasar, keterlambatan waktu pengapalan (Azhar dan Syamni, 2010).

Aceh memiliki potensi besar untuk pengembangan peternakan guna mengimbangi tingginya permintaan masyarakat akan daging dan telur. Hal ini didukung oleh iklim yang sesuai untuk budidaya ternak, ketersediaan lahan yang luas untuk pembibitan dan pakan ternak, adanya sumberdaya manusia peternakan meskipun masih terbatas. Usaha peternakan rakyat di Aceh pada umumnya bersifat mandiri dan berskala kecil. Beberapa diantaranya mendapat bantuan bibit dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Hanya peternakan ayam pedaging yang dikembangkan secara kemitraan dengan pola PIR antara PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT. Confeed dengan peternak. Namun pola kemitraan ini dinilai merugikan peternak, karena kerugian dalam usaha peternakan ayam pedaging ditanggung sepenuhnya oleh peternak dan pemasaran dilakukan pada pedagang yang ditunjuk oleh perusahaan inti.

Kendala pengembangan usaha peternakan rakyat di Aceh adalah lemahnya permodalan, tingginya harga pakan dan kurangnya pabrik pakan konsentrat, manajemen usaha yang tidak terstruktur, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi sehingga pemasaran umumnya dilakukan di lokasi ternak, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari dinas terkait, adanya masalah sosial dari dampak usaha peternakan bagi masyarakat sekitar, lokasi ternak umumnya hanya memanfaatkan lahan pekarangan rumah, kurang terorganisir, kurangnya akses pasar dan informasi harga, masalah kepastian hukum dan keamanan yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh. Upaya Pemerintah Aceh selama ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, belum memberikan hasil yang optimal. Indikatornya adalah belum tercapainya swasembada daging dan kebutuhan akan telur sebagian besar masih dipasok dari luar Aceh (Syamni dan Ikramuddin, 2014).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

- Tujuan Umum

Memformulasikan model kemitraan rantai pasok dan rantai nilai usaha peternakan rakyat serta pola pengembangan peternakan rakyat dalam konteks pembangunan ekonomi lokal berbasis peternakan di Aceh.

- Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian pada tahun pertama, yaitu :

1. Mengkaji kendala dan peluang kemitraan usaha antara peternak dengan pelaku bisnis
2. Memformulasikan model kemitraan pengembangan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal.
3. Memberikan alternatif kebijakan pengembangan peternakan rakyat secara terpadu dan berdaya saing serta layak untuk dikembangkan di Aceh.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berkenaan dengan kemitraan usaha telah banyak digulirkan dalam sejarah perkembangan penelitian ilmiah namun pembahasan potensi kelembagaan kemitraan dengan menekankan peranan kelembagaan lokal dalam usaha peternakan rakyat belum dilakukan di Aceh. Pengembangan kelembagaan lokal diharapkan mampu mengatasi permasalahan khususnya di tingkat peternak. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi positif, yaitu :

- a. **Bagi pemerintah.** Memberikan rekomendasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat peternak dan usaha peternakan rakyat yang efisien melalui kemitraan.
- b. **Bagi masyarakat khususnya dunia usaha.** Memberikan masukan alternatif usaha peternakan bersistem kemitraan yang lebih menguntungkan.
- c. **Bagi kemajuan ilmu pengetahuan.** Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi ilmu peternakan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian meliputi formulasi model kemitraan berdasarkan rantai pasok dan rantai nilai pada usaha peternakan rakyat di Aceh yang mencakup aspek sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran produk ternak rakyat. Kajian kemitraan antara peternak dengan pelaku bisnis juga ditinjau berdasarkan kendala dan peluang kemitraan sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu bentuk kemitraan yang benar-benar menguntungkan antara pihak yang bermitra khususnya peternak. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal untuk menyusun skenario kebijakan dan strategi pengembangan peternakan rakyat yang layak diterapkan di Aceh.

4.2 Metode Penentuan Lokasi dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara *purposive* yakni daerah sentra produksi dan pengembangan ternak di Aceh, khususnya sapi potong, ayam pedaging dan petelur, serta itik . Dasar pertimbangan pada perbedaan lokasi sentra produksi, pusat-pusat pengembangan, sifat penyebaran dalam satu wilayah, tujuan pasar dan struktur kelembagaan kemitraan yang terbentuk

dalam usaha peternakan di Aceh. Dengan demikian, lokasi penelitian ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jenis Ternak dan Lokasi Penelitian

No.	Jenis Ternak	Lokasi Penelitian
1.	Sapi potong	Kabupaten Aceh Besar
2.	Ayam Pedaging (Ayam buras)	Kabupaten Aceh Utara
3.	Ayam Petelur (Ayam buras)	Kabupaten Aceh Timur
4.	Itik	Kabupaten Aceh Utara

Dalam setiap kabupaten, akan dipilih dua kecamatan yang merupakan daerah sentra produksi ternak, selanjutnya di setiap kecamatan dipilih dua desa sentra produksi sebagaimana pemilihan kabupaten dan kecamatan. Tiap desa akan dipilih 5 orang peternak yang memelihara ternak terbanyak di desa tersebut. Total responden peternak dalam penelitian ini adalah 80 peternak. Responden dari pelaku bisnis ditetapkan minimal 2 orang pada tiap jenis ternak dan berdasar integrasi usaha secara vertikal.

4.3 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi sumber data primer (*primary data sources*) dan sumber data sekunder (*secondary data sources*). Data primer dikumpulkan dengan menggunakan prosedur pengambilan contoh (*sampling*) dalam suatu survei penelitian. Sumber data sekunder dari dokumentasi pada berbagai instansi terkait meliputi Bappeda dan BPS Aceh, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten, Kantor Statistik Kecamatan, Dinas Pasar setempat, jurnal dan publikasi ilmiah, serta berbagai sumber data resmi lainnya.

Berkenaan dengan rencana pengembangan usaha peternakan rakyat, sebagai analisis perbandingan juga dilakukan tinjauan pengembangan usaha peternakan rakyat bersistem kemitraan di Malang, berupa data dan informasi

usaha-usaha peternakan rakyat, agroindustri pengolah, dan jaringan kemitraan pemasaran ternak maupun produk olahan ternak.

4.4 Analisis Data

Tahun II

1) Mengkaji kendala dan peluang kemitraan usaha antara peternak dengan pelaku bisnis serta merumuskan strategi pengembangan kemitraan usaha yang layak diterapkan di Aceh

Kajian kemitraan usaha antara peternak dengan pelaku bisnis dilakukan melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT dilakukan untuk memformulasikan strategi yang harus diterapkan, analisa ini menggolongkan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh usaha-usaha peternakan sebagai faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Analisis kuantitatif menggunakan matriks IFE, EFE dan IE dengan tahapan berikut : (1) identifikasi Faktor Internal dan Eksternal usaha peternakan, (2) penentuan bobot setiap peubah, (3) peringkat. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan usaha peternakan dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal dengan cara mendapatkan angka yang menggambarkan kondisi usaha peternakan terhadap kondisi lingkungannya.

Nilai IFE dikelompokkan dalam posisi kuat (3,0-4,0), posisi rata-rata (2,0-2,99) dan posisi lemah (1,0-1,99). Sedangkan nilai-nilai EFE dikelompokkan dalam posisi tinggi (3,0-4,0), posisi sedang (2,0-2,99) dan posisi rendah (1,0-1,99). Matriks SWOT disusun untuk menemukan strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Tabel 4.2 Matriks SWOT

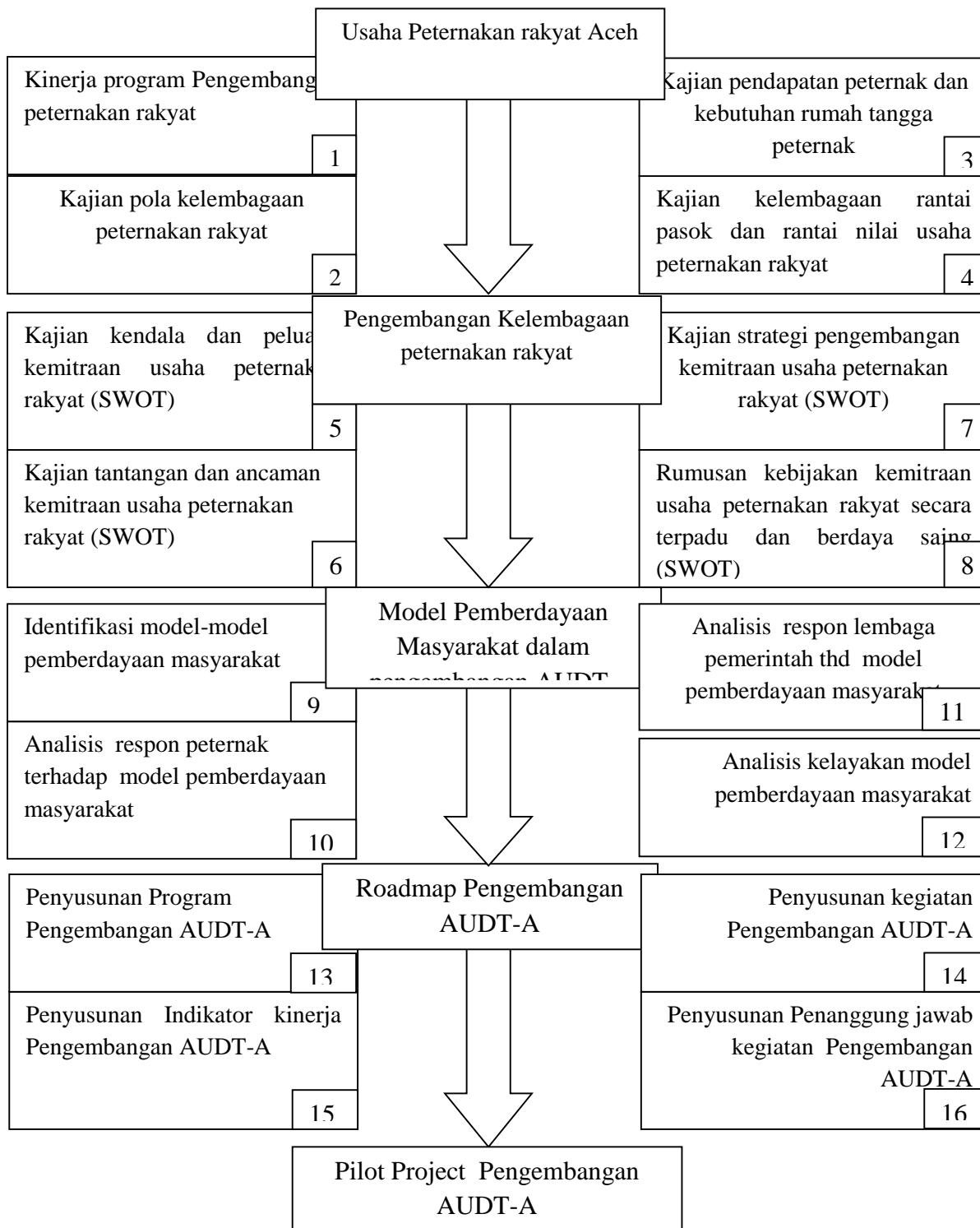
Internal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Eksternal	Tentukan 5 – 10 faktor kekuatan internal	Tentukan 5 – 10 faktor kelemahan internal
Opportunes (O)	Strateg (S-O)	Strateg (W-O)
Tentukan 5 – 10 faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T)	Strateg (S-T)	Strateg (W-T)
Tentukan 5 – 10 faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

2) **Memformulasikan model dan alternatif kebijakan pengembangan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal berbasis peternakan.**

Berdasarkan strategi pengembangan, maka disusun rancangan program dengan metoda *Logical Framework Approach (LFA)* dan melibatkan stakeholders terkait, untuk menentukan masalah pokok dan masalah prioritas.

4.5 Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagaimana berikut :



Gambar 4.1 Model Fishbone Pengembangan AUDT-A

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

5.1 Perkembangan Usaha Peternakan Rakyat Di Aceh

5.1.1 Usaha Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Aceh Besar

Program pemerintah untuk melakukan pemurnian sapi Aceh terus digalakkan, baik yang dilakukan di Desa Pulo Raya Kabupaten Aceh Besar maupun dalam bentuk pemberian bantuan bakalan sapi kepada peternak untuk melakukan pembibitan sapi lokal Aceh dengan sistim Hibah. Pemberian bantuan bakalan melalui kelompok peternak selanjutnya dikelola oleh kelompok kepada peternak untuk pembibitan.

Pemberian bantuan bakalan sapi potong juga terus digalakkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengembangkan sapi lokal Aceh. Namun demikian, sejumlah peternak lebih menyukai penggemukkan sapi luar Aceh seperti sapi Brahmana, Limousin dan Simental, karena secara fisik sapi luar Aceh badannya lebih besar dari sapi Aceh sehingga perolehan daging sapi lebih banyak.

Adapun kegiatan pengembangan ternak khususnya sapi yang dilakukan Di Kabupaten Aceh Besar adalah :

1. Pada tahun 2012
 - a. Pengendalian sapi/kerbau betina produktif.

- Penyelamatan sapi/kerbau betina produktif
 - b. Pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan
 - Pengembangan kawasan sapi potong
 - c. Pengembangan integrasi ternak Ruminansia
 - Pengembangan integrasi ternak sapi
2. Pada tahun 2013
- a. Pembibitan sapi potong
 - Pembibitan sapi potong
 - b. Pengembangan kawasan sapi potong
 - Pengembangan kawasan sapi potong
 - c. Pengembangan INKA
 - Pengadaan sapi pejantan pemacek
3. Pada tahun 2014
- a. Pengembangan kawasan sapi potong

Untuk pengembangan sapi Aceh dengan pakan olahan, pemerintah juga memberi bantuan berupa mesin pemotong kepada sejumlah kelompok peternak. Untuk pakan sapi, selain pakan hijauan, sekelompok peternak ada juga yang memberi pakan olahan. Di tingkat kelompok peternak, pakan olahan dihaluskan dengan bantuan mesin selanjutnya diolah (diaduk) campuran pakan (dedak, coklat, bungkil kelapa sawit, kedelai, dedak, dan gandum) secara merata dengan persentase sebagai berikut : sagu sebanyak 55%, kedelai sebanyak 10%, bungkil sawit sebanyak 20%, gandum sebanyak 10%, dan dedak sebanyak 5%.

Berikut diperlihatkan data bantuan sapi dan fasilitas sapi yang diberikan pemerintah kepada peternak.

Tabel 5.1 Data Kelompok Tani Ternak Sapi Di Kabupaten Aceh Besar

No.	Nama Kelompok	Alamat Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Fasilitas yang diperoleh	Jumlah Sapi
-----	---------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	-------------

				kelompok	
1.	Agrona	Desa Saree Aceh, Kec Lembah Seulawah	10	Ternak sapi, Rumah Kompos	76
2.	Hidayah Lam Seulawah	Desa Lamtamot, Kec. Lembah Seulawah	15	-	70
3.	Seulawah Raya	Desa Lamcarak, Kec. Seulimum	8	-	24
4.	Bersama	Desa Bithak, Kec. Kuta Cot Glie	20	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat- obatan	56
No.	Nama Kelompok	Alamat Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Fasilitas yang diperoleh kelompok	Jumlah Sapi
5.	Seunong Cot	Desa Keumire, Kec. Kuta Cot Glie	25	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat- obatan	62
6.	Kube Cot Jure	Desa Lampanah Dayah, Kec. Indrapuri	29	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat- obatan	51
7.	Sinar Muda	Desa Meureu Ule Titi, Kec. Indrapuri	30	HMT	43

8.	Cot Malem Farm	Desa Krueng Lamkareung, Kec. Indrapuri	30	Ternak sapi, kandang, Obat-obatan	32
9.	Hikmah Tsunami	Desa Lembeutong, Kec. Indrapuri	10	Rumah Kompos	14
10.	Usaha Jaya	Desa Tumbo Baro, Kec. Kuta Malaka	20	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	32
11.	Peukan Cot	Desa Teu Dayah, Kec. Kuta Malaka	13	-	12
12.	Cot Pakrut	Desa Lambirah, Kec. Sukamakmur	30	Ternak sapi, obat-obatan, Pakan, Sarana Recording	56
13.	Sibreh Jaya	Desa Bukloh, Kec. Sukamakmur	10	Ternak sapi	32
14.	Saboh Hate	Desa Piyeung, Kec. Montasik	25	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	34
15.	Bak Mee Raya	Desa Cot Leuot, Kec. Blang Bintang	15	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	60
No.	Nama Kelompok	Alamat Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Fasilitas yang diperoleh	Jumlah Sapi

				kelompok	
16.	Aneuk Tani	Desa Krueng Anoi, Kec. Kuta Baro	20	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	47
17.	Sapeu Pakat	Desa Cot Preh, Kec. Kuta Baro	13	-	37
18.	Usaha Mitra Ternak Bersama	Desa Lampuuk, Kec. Kuta Baro	10	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	-
19.	Meubeudoh Sajan	Desa Lam U, Kec. Ingin Jaya	10	-	-
20.	Bina Bersama	Desa Lubok Batee, Kec. Ingin Jaya	10	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	-
21.	Mandiri Sejahtera	Desa Lamreh, Kec. Mesjid Raya	10	Ternak sapi, kandang, HMT, Obat-obatan	70

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Besar, 2015.

5.1.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Aceh Timur

Program pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang digalakkan pemerintah melalui Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur tidak berkembang dengan baik, bahkan usaha peternakan tersebut terhenti, kandang kosong dan tidak dimanfaatkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan mengembangkan usaha peternakan ayam petelur guna mengakomodir meningkatnya kebutuhan permintaan telur ayam oleh masyarakat, mengurangi ketergantungan pasokan

telur dari Provinsi Sumatera Utara, dan mengantisipasi kenaikan harga telur yang tinggi.

Sejumlah peternak mendapat bantuan berupa kandang ayam, DOC (bibit ayam), pakan, vitamin dan obat-obatan. Pemberian bantuan pakan, vitamin dan obat-obatan hingga tercapai 50% telur dan peternak mampu memberi DOC pada usaha beternak berikutnya. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan pakan dilakukan peternak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peternak tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan bagi ayam petelur karena tingginya kenaikan harga pakan sementara harga telur ayam cenderung berfluktuasi.

Program pengembangan ayam petelur yang digalakkan pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan tidak berjalan dengan baik dan tidak berkesinambungan. Sejumlah kandang binaan pemerintah terlihat kosong dan tidak lagi melakukan usaha peternakan ayam petelur akibat kurangnya pembinaan dan pengawasan dari dinas terkait, tingginya harga pakan, manajemen pengelolaan kurang baik, sanitasi kandang kurang baik, dan harga telur ayam yang berfluktuasi. Hendaknya usaha peternakan dikembangkan secara berkelompok dalam bentuk demplot (demonstrasi plot) dengan manajemen pengadaan pabrik pakan olahan guna mengantisipasi kenaikan harga pakan dan memenuhi kebutuhan pakan olahan bagi ayam petelur.

Sebagaimana diketahui bahwa telur ayam memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena kebutuhan akan telur diperkirakan akan semakin meningkat dengan meningkatnya pendapatan permintaan telur bukan hanya ditingkat konsumen rumah tangga namun juga untuk industri pengolahan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Siregar (2003), bahwa prospek pengembangan agribisnis ayam ras petelur di masa yang akan datang dilihat dari sisi penawaran (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) telur di Indonesia. Dari sisi permintaan, prospek agribisnis ayam ras petelur sangat berkaitan dengan peranan telur ayam ras dalam struktur konsumsi telur dan sifat permintaannya yang sangat sesuai dengan perkembangan masa depan. Di samping semakin pentingnya peranan telur ayam ras dalam struktur konsumsi telur, telur ayam ras

memiliki sifat permintaan yang *income estic demand*. Bila pendapatan meningkat, maka konsumsi telur juga meningkat. bila dilihat kecendrungan produksi telur ayam ras yang meningkat sebesar 4,50 persen per tahun atau sekitar 709,72 ribu ton pada tahun 2005, maka peluang pasar telur ayam mencapai 269,98 ribu ton. Peluang pasar ini diisi oleh telur ayam buras dan telur itik yang pangasanya masing-masing 15 persen dan selebihnya merupakan peluang pasar telur ayam ras. Peluang pasar ini belum termasuk pasar ekspor, baik dalam bentuk telur segar maupun powder.

Hasil analisis aspek finansial berdasarkan kriteria kelayakan investasi menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan nilai NPV sebesar Rp 2.359.608.260,73 lebih besar dari nol, nilai net B/C sebesar 3,28 lebih besar dari satu, nilai IRR sebesar 71 persen lebih besar dari tingkat *discount rate* yang ditentukan, dan PP berada sebelum masa proyek berakhir yaitu 2 tahun 3 bulan. Hasil analisis *sensitivitas* menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam ras petelur di Dian Layer Farm masih tetap layak dijalankan dan mendapatkan keuntungan apabila penurunan produksi sebesar 26 persen dan tidak lebih dari 37,1 persen dimana pada kondisi ini usaha mengalami titik impas. Kenaikan harga pakan konsentrat sebesar 37 persen membuat perusahaan masih tetap mendapatkan keuntungan. Kenaikan harga pakan sebaiknya tidak lebih dari 76,2 persen dimana perusahaan mengalami titik impas. Kenaikan harga DOC tidak berpengaruh besar dengan kegiatan usaha tetapi harus tetap diperhatikan. Pada saat harga DOC mengalami kenaikan sebesar 28,6 persen DLF masih tetap mendapat keuntungan. Ketika usaha melakukan pengembangan usaha dengan menambah jumlah populasi ayam untuk meningkatkan produktivitas, dilihat dari sisi analisis finansial usaha ini masih layak untuk dijalankan (Sianturi, 2011).

5.1.3 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara memiliki 31.810 rumah tangga peternakan yang tersebar di 27 kecamatan. Petugas peternakan berjumlah 29 orang yang terdiri dari 16 Mantri hewan, 1 Snakma, 5 Sarjana Peternakan, dan 7 Dokter Hewan. Pada tahun 2014, populasi ternak unggas meliputi ayam buras sebanyak 253.914 ekor, ayam pedaging/Broiler sebanyak 842.718 ekor, ayam petelur sebanyak 36.435 ekor, itik sebanyak 163.103 ekor, itik manila

sebanyak 44.999 ekor, kelinci sebanyak 870 ekor, puyuh sebanyak 3.215 ekor, dan merpati sebanyak 3.005 ekor. Jumlah produksi daging ayam sebanyak 666.909 kg dengan sentra produksi di Kecamatan Samudera sebanyak 148.434 kg (22,26%) dan Kecamatan Muara Batu sebanyak 112.203 kg (6,82%). Konsumsi daging ayam sebesar 33.345 kg dan pemotongan ayam pedaging sebanyak 513.007 ekor (Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan daging ayam di tingkat konsumen dan industri olahan dapat dipenuhi dari produksi ayam pedaging oleh peternak di Kabupaten Aceh Utara.

Usaha Peternakan ayam pedaging di Kabupaten Aceh Utara berkembang dengan 3 (tiga) pola usaha yaitu usaha peternakan ayam pedaging dengan modal sendiri oleh peternak, usaha peternakan ayam pedaging binaan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, dan usaha peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan inti-plasma antara perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Perusahaan yang bermira dengan peternak adalah PT. Phokphand, PT. Indo Agrinusa (JAPFA) dan PT. Confeed.

Usaha peternakan ayam pedaging dengan modal sendiri merupakan usaha peternakan ayam pedaging skala kecil, hanya berkisar 500 – 1.000 ekor ayam, sedangkan usaha peternakan dengan binaan pemerintah berkisar 3.000 hingga 5.000 ekor, sedangkan usaha peternakan dengan pola kemitraan inti plasma menngusahakan ayam pedaging berkisar 5.000 hingga 15.000 ekor.

Pada pola usaha mandiri, pengelolaan usaha cenderung dilakukan dengan sistim bagi hasil antara pemilik modal dengan peternak dengan pembagian 50% : 50%. Bibit, pakan, dan obat-obatan ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kandang dan tenaga kerja ditanggung oleh peternak. Usaha peternakan ini sangat rentan dengan masalah kenaikan harga pakan olahan dan harga ayam pedaging yang cenderung berfluktuasi.

Pada pola usaha peternakan ayam pedaging dengan binaan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bantuan yang diberikan berupa bibit dan pakan olahan selama 25

hari. Karena tingginya harga pakan dan terbatasnya bantuan modal usaha, maka peternak cenderung melakukan usaha beternak ayam pedaging selama 25 hari saja, selanjutnya ayam pedaging langsung dijual sehingga harga jual ayam pedaging relatif rendah dan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan peternak. Moral Hazard yang berkembang di tingkat peternak adalah peternak cenderung menganggap bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bantuan dengan dana hibah sehingga peternak tidak fokus untuk mengembangkan menjadi bantuan modal usaha dan peternak dapat melakukan usaha peternakan ayam pedaging secara berkelanjutan. Hal inilah yang mendasari program pengembang peternakan ayam pedaging tidak berjalan dengan baik. Handaknya bantuan pakan yang diberikan hingga panen, dan perlu pembinaan dan pengawasan dari dinas terkait secara kontinue hingga peternak dapat melakukan usaha peternakan secara mandiri.

Usaha peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan inti-plasma cenderung lebih berhasil dibanding dua (2) pola usaha sebelumnya. Perusahaan sebagai inti memasok bibit ayam (DOC), pakan, vitamin dan obat-obatan, sedangkan kandang dan tenaga kerja ditanggung oleh peternak. Perusahaan juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peternak melalui tenaga teknis lapangan dan tenaga ahli peternakan. Pemasaran ayam pedaging dilakukan kepada pedagang yang ditunjuk oleh perusahaan inti dengan harga jual ayam pedaging yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama. Jika harga jual ayam pedaging di kontrak lebih rendah dari harga pasar, maka peternak akan mendapat keuntungan dan bonus 30% dari selisih harga pasar dengan harga di kontrak. Jika harga jual ayam pedaging di kontrak lebih tinggi dari harga pasar, maka peternak akan mendapat keuntungan dengan penjualan ayam sesuai harga jual di kontrak. Kerugian berupa kematian ayam akibat penyakit dan kelalaian peternak ditanggung oleh peternak dan peternak harus melaporkan setiap ayam yang mati melalui tenaga teknis lapangan. Jika kematian ayam karena wabah, maka resiko kematian ayam ditanggung bersama antara peternak dengan perusahaan inti. Pembagian keuntungan antara peternak (pemilik kandang) dengan pengelola ternak berkisar antara 25% hingga 28% dari keuntungan yang diperoleh

peternak dengan perusahaan inti. Fakhrudin (2013) menyatakan bahwa analisis kelayakan non finansial usaha peternakan ayam broiler dengan sistem kemitraan pola inti plasma bersama PT TJ Farm layak dijalankan. Analisis non finansial ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek hukum, dan aspek ekonomi sosial. Aspek pasar dikatakan layak karena peternakan ayam broiler ini aman dari kerugian akibat jatuhnya harga, memiliki pasar, tidak menghadapi permasalahan distribusi produk, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Aspek teknis dan produksi layak dijalankan karena peternakan ayam broiler ini memiliki lahan dan kandang yang memenuhi kualifikasi, pengadaan bibit dan pakan yang tepat waktu dan berkualitas, pengadaan dan manajemen kesehatan yang disiplin dan teratur, ketersediaan bahanbahan penunjang yang terbaik dan tepat waktu, memiliki tenaga kerja yang berpengalaman, jujur dan pekerja keras, dan proses produksi yang sistematis. Aspek manajemen dan organisasi dikatakan layak karena memiliki pembagian tugas yang jelas, terperinci dan tertulis, sehingga manajemen usaha berjalan dengan baik. Aspek hukum dikatakan layak karena memiliki ketentuan kerjasama tertulis yang jelas dan saling memuaskan kedua belah pihak, dan mendapatkan izin pendirian dari RT/RW. Aspek ekonomi dan sosial dikatakan layak karena tidak merugikan lingkungan sekitar dan dapat berkontribusi terhadap masyarakat. Hasil analisis *switching value* menunjukkan usaha peternakan ayam broiler ini rentan terhadap kenaikan harga pakan di atas 10.11% dan penurunan harga jual ayam diatas 6.31%. Peternakan ayam broiler ini lebih sensitif terhadap penurunan harga jual ayam.

5.1.4 Usaha Peternakan Itik Di Kabupaten Aceh Utara

Usaha peternakan itik yang berkembang di Kabupaten Aceh Utara berdasar 2 pola usaha, yaitu usaha mandiri (modal sendiri) dan usaha peternakan binaan pemerintah. Pada pola usaha 3 – 10 ekor itik, pakan berupa sisa-sisa makanan rumah tangga dan pakan di luar lingkungan dengan sistim pemeliharaan tradisional dimana itik dilepas keluar ruangan atau tidak dikandangkan. Pola usaha mandiri biasanya berupa usaha beternak dengan

skala rumah tangga (3 hingga 10 ekor itik) dan usaha dengan skala 500 hingga 1000 ekor. Pada skala usaha ini, peternak memiliki usaha pembuatan pakan olahan sendiri dan cenderung dilakukan dengan sistim bagi hasil antara pemilik modal dengan peternak.

Usaha peternakan itik dengan pola binaan pemerintah berkisar 500 ekor itik per peternak atau 5.000 ekor itik per kelompok ternak. Pemerintah berusaha melakukan penyebaran itik dengan program bantuan bibit itik kepada sejumlah peternak. Pada tahun 2014, program penyebaran itik difokuskan kepada nelayan dan masyarakat pesisir pantai. Program penyebaran ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara dapat bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari pusat, APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) dari Propinsi Aceh, APBD (Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah) dari Kota/Kabupaten setempat, dan dari Dana Aspiransi Dewan (DPRA dan DPRD).

Di Kabupaten Aceh Utara, total produksi daging itik sebanyak 41.579 kg yang terdiri dari itik (Duck Anas Moscha) sebanyak 37.012 kg dan itik manila (Duck Cairina Moschata) sebanyak 4.567 kg. Konsumsi daging itik sebanyak 1.851 kg dan itik manila sebanyak 228 kg. Pemotongan itik sejumlah 30.843 ekor dan itik manila sejumlah 3.806 ekor (Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, 2014). Hal ini jelas menunjukkan bahwa permintaan daging itik dapat dipenuhi dari produksi lokal dan tingginya permintaan daging itik pada rumah makan/restoran dan industri olahan skala rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan itik lebih menguntungkan, teknis pengelolaan lebih mudah dan tidak terpengaruh dengan dengan kenaikan harga pakan (pola makan itik yang lebih sedikit) serta harga telur itik lebih mahal dibanding harga telur ayam. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Sarwanto (2011) yang menyatakan bahwa usaha pembesaran itik pedaging pada Peternakan Maju Bersama sensitif terhadap penurunan volume produksi dan harga karkas namun tidak sensitif terhadap peningkatan harga pakan broiler dan bibit. Hal itu dikarenakan nilai

pengganti (*switching value*) dari penurunan volume produksi dan harga karkas relatif rendah yaitu 13,78 persen untuk penurunan volume produksi dan 18,14 persen untuk penurunan harga karkas sedangkan nilai pengganti (*switching value*) dari peningkatan harga pakan broiler dan bibit relatif tinggi yaitu sebesar 75,00 persen untuk peningkatan harga pakan broiler dan 88,09 persen untuk peningkatan harga bibit.

5.2 Peraturan pemerintah tentang kelembagaan Kemitraan Usaha

Perkembangan peraturan atau kebijakan pemerintah tentang kelembagaan kemitraan usaha yaitu :

1. Sejak pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an dikeluarkan peraturan tentang kemitraan usaha dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Berdasarkan peraturan ini berkembang kemitraan dalam bentuk PIR-Perkebunan, PIR-Perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat dan berbagai variasi atau model kemitraan usaha lainnya.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan yang diarahkan atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Saling memerlukan dimaksudkan kebutuhan pasokan bahan baku oleh perusahaan dapat dipenuhi oleh kelompok mitra, dan bagi kelompok mitra dapat memasarkan hasil kepada perusahaan serta bimbingan teknis, saling memperkuat dan menguntungkan kedua belah pihak.
3. SK Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, serta dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra. Pola-pola kemitraan yang dapat dilaksanakan, antara lain : inti-plasma, sub-kontrak, dagang umum, keagenan, atau bentuk-bentuk lain, misalnya kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) yang dalam pengawasan dan pengendalian melibatkan Badan Agribisnis, Ditjen Lingkup Departemen

Pertanian, Balai Penyuluha Pertanian, serta Dinas Teknis Lingkup Departemen Pertanian.

4. SK Mentan No. 944/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Tingkat hubungan kemitraan usaha dibobot dan dinilai berdasarkan indikator manajemen dan manfaat, antara lain : (a) aspek manajemen, indikator-indikator mencakup perencanaan (faktor yang dinilai adalah perencanaan kemitraan, kelengkapan perencanaan), pengorganisasian (faktor yang dinilai adalah bidang khusus dan kontrak kerjasama), pelaksanaan dan efektifitas kerjasama (faktor yang dinilai adalah pelaksanaan kerjasama dan efektifitas kerjasama); dan (b) aspek manfaat, digunakan berbagai indikator, antara lain : indikator ekonomi (faktor yang dinilai adalah pendapatan, harga produktivitas, resiko usaha), indikator teknis (faktor yang dinilai adalah mutu, penguasaan teknologi), dan indikator sosial (faktor yang dinilai adalah keinginan untuk keberlanjutan atau kontinuitas usaha, pelestarian lingkungan) selanjutnya pemberian bobot dan nilai. Pada akhirnya, tingkat hubungan kemitraan dapat dikelompokkan dalam empat kelas, yaitu : kemitraan pra prima, kemitraan prima, kemitraan prima madya, dan kemitraan prima utama.

5.3 Kendala dan Peluang Sektor Peternakan Rakyat di Aceh

Dalam pengembangan sektor peternakan di Aceh, terdapat beberapa kendala, baik pada aspek teknis dan di tingkat peternak, manajemen rantai pasok dan kelembagaan kemitraan. Di samping banyaknya kendala, Aceh juga memiliki peluang yang besar untuk pengembangan sektor peternakan Berikut akan dijabarkan kendala dan peluang pengembangan peternakan sapi potong, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik.

A.1 Kendala Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Aceh Besar

(a) Aspek teknis

1. Pemberian pakan sapi hanya berupa pakan hijauan sehingga saat musim kemarau peternak kesulitan memperoleh bahan pakan hijauan.
2. Tidak ada pakan olahan pada tingkat peternak karena pakan olahan hanya diolah oleh perusahaan sapi untuk kebutuhan sendiri dan tidak dijual.
3. Lemahnya permodalan dan kurang akses peternak terhadap sumber permodalan formal.
4. Sapi potong jarang dimandikan dan kurangnya sanitasi kandang sehingga berpengaruh terhadap kualitas sapi.
5. Terbatasnya bibit sapi murni Aceh.
6. Keamanan sapi kurang terjamin karena umumnya lokasi peternakan sapi di daerah tegalan dan sekitar bantaran sungai Krueng Aceh yang jauh dari pemukiman penduduk.
7. Posisi tawar peternak relatif rendah karena harga sapi ditentukan oleh harga pasar dan kualitas sapi yang dijual.

(b) Manajemen Rantai Pasok

1. Terbatasnya infrastruktur seperti pasar hewan dan pasar daging sehingga peternak cenderung menjual kepada pedagang pengumpul.
2. Tingginya biaya transportasi ke pasar hewan.
3. Umumnya industri pengolahan cenderung menggunakan daging sapi impor karena harga daging sapi impor lebih murah dibanding daging sapi Aceh.
4. Tingginya impor sapi dan daging sapi di Aceh.

(c) Kelembagaan Kemitraan

1. Terbatasnya industri pengolahan sehingga belum ada kemitraan langsung antara peternak dengan industri pengolahan.
2. Lemahnya konsolidasi kelembagaan di tingkat petani, baik dari aspek keanggotaan, manajemen, akses pasar, dan akses permodalan.
3. Pola kemitraan sapi potong yang terbentuk hanya pola dagang umum, sehingga tidak menyentuh aspek teknis dan permasalahan kelembagaan.

A.2 Peluang Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Aceh Besar

1. Tingginya permintaan daging sapi setiap tahunnya di Aceh.
2. Tingginya harga daging sapi di Aceh terutama pada hari meugang atau menjelang puasa dan hari-hari besar keagamaan di Aceh.
3. Adanya kemungkinan pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan sapi.
4. Adanya program pemerintah untuk pemurnian sapi Aceh.
5. Adanya program bantuan bibit sapi dari pemerintah.
6. Tingginya permintaan daging untuk industri pengolahan.

B. 1 Kendala Pengembangan Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Aceh Timur

(a) Aspek teknis

1. Tingginya harga pakan dan lemahnya akses modal sehingga peternakan ayam petelur baru dilakukan pada beberapa lokasi peternakan saja dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
2. Tingginya serangan penyakit pada ayam petelur yang menyebabkan penurunan produktivitas telur yang dihasilkan.
3. Terbatasnya tenaga ahli peternakan dan kurangnya pelayanan kesehatan ternak dari lembaga pemerintah
4. Sanitasi kandang kurang baik dan menyebabkan tingginya resiko serangan penyakit pada ayam dan petugas peternakan.
5. Manajemen pengelolaan usaha yang kurang baik sehingga beberapa usaha peternakan tidak berkembang dengan baik.
6. Belum ada pemanfaatan limbah peternakan secara komersial

7. Pengembangan peternakan ayam petelur masih mengandalkan bantuan bibit dan pakan dari pemerintah dan hanya ada beberapa usaha mandiri.
8. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah.

(b) Manajemen Rantai Pasok

1. Terbatasnya produksi telur dan pemasaran telur hanya di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan belum mampu memenuhi kebutuhan telur di wilayah tersebut.
2. Sarana transportasi terbatas dan biayanya mahal sehingga pemasaran dilakukan di lokasi peternakan
3. Harga telur mengikuti harga pasar di Medan (Propinsi Csumatera Utara) yang cenderung berfluktuatif.

(c) Kelembagaan Kemitraan

1. Belum ada kelembagaan kemitraan yang solid baik pada tingkat peternak, kelembagaan kesehatan, pemasaran dan pengolahan.
2. Terbatasnya kelembagaan pemasaran sehingga rantai pasok telur ayam didasarkan pada mekanisme harga pasar.
3. Belum ada industri pengolahan skala besar sehingga permintaan telur terbatas pada permintaan masyarakat, industri rumah tangga (industri pembuatan kue), dan restoran/rumah makan.
4. Belum ada industri pengolahan pakan di Aceh sehingga menyebabkan tingginya harga pakan olahan.

B.2 Peluang Pengembangan Peternakan Ayam petelur Di Kabupaten Aceh Timur

1. Tingginya permintaan telur ayam sementara produksi telur lokal belum mampu memenuhi permintaan pasar.
2. Tersedianya lahan peternakan yang luas.
3. Adanya program Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur untuk pengembangan ayam petelur.
4. Adanya permintaan telur dari industri pengolahan skala rumah tangga.

C.1 Kendala Pengembangan Peternakan Ayam Pedaging Di Kabupaten Aceh Utara

(a) Aspek teknis

1. Tingginya harga pakan sedangkan harga daging ayam cenderung fluktuatif sehingga usaha peternakan ayam pedaging tidak berkembang dengan baik, beberapa diantaranya didapati sejumlah kandang yang dibiarkan kosong.
2. Pola kandang ayam yang rata dengan tanah menyebabkan resiko penyakit yang tinggi bagi ayam dibandingkan pola kandang bertingkat.
3. Tingginya serangan penyakit pada ayam dan berpengaruh terhadap penurunan produktifitas ayam yang dihasilkan.
4. Belum ada pemanfaatan limbah peternakan secara komersial.
5. Lemahnya akses permodalan bagi peternak dari sumber permodalan formal.
6. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

(b) Manajemen Rantai Pasok

1. Sarana transportasi terbatas dan biaya mahal sedangkan lokasi peternakan jauh dari pasar.
2. Harga ayam berfluktuatif dan peternak kalah bersaing harga ayam dengan PT. Phokphand dan PT. Confeed yang mengembangkan peternakan bersistem kemitraan di Aceh yang cenderung menentukan harga ayam relatif lebih rendah dibanding harga ayam di tingkat peternak.
3. Pasokan ayam pedaging di Aceh didominasi oleh PT. Phokphand dan PT. Confeed berdasar kemitraan antara peternak dengan kedua perusahaan tersebut.

(c) Kelembagaan Kemitraan

1. Kurangnya konsolidasi kelembagaan kemitraan terutama pada aspek teknis (produksi) dan pemasaran.
2. Belum ada industri pengolahan pakan di Aceh. Pasokan pakan didominasi oleh PT. Phokphand dan PT. Confeed berdasar azas kemitraan
3. Belum ada industri pengolahan berbasis daging skala perusahaan di Aceh sehingga permintaan daging untuk memenuhi permintaan konsumtif masyarakat, industri pengolahan rumah tangga, dan restoran/rumah makan.

C.2 Peluang Pengembangan Peternakan Ayam Pedaging Di Kabupaten Aceh Utara

1. Tingginya permintaan daging ayam terutama pada saat hari ‘meugang’, menjelang puasa dan hari besar keagamaan di Aceh.
2. Adanya perusahaan yang menjalin kemitraan dengan peternak dalam aspek produksi dan pemasaran dengan pola inti-plasma.
3. Tingginya harga daging ayam di Aceh dibanding daerah lain.
4. Potensi pengembangan ayam cukup tinggi dan tersedianya sumberdaya peternakan ayam, baik lahan maupun tenaga ahli peternakan.

D.1 Kendala Pengembangan Peternakan Itik Di Kabupaten Aceh Utara

(a) Aspek teknis

1. Pengelolaan usaha peternakan itik umumnya skala kecil dan cenderung untuk konsumtif rumah tangga dan hanya sedikit yang komersial.
2. Pemberian pakan olahan hanya pada usaha peternakan itik skala besar dan pakan olahan diproduksi sendiri dan tidak dijual.

3. Pakan itik diperoleh dari alam dan sisa-sisa makanan rumah tangga sehingga kurangnya upaya peternak untuk meningkatkan kualitas telur dan daging itik.
4. Pemeliharaan itik skala rumah tangga berkisar 2-10 ekor dan tidak dikandangan dengan pola tradisional.

(b) Manajemen Rantai Pasok

1. Belum ada kendala yang berarti dalam pemasaran itik karena telur dan daging itik memiliki rasa yang khas sehingga permintaan relatif tinggi terutama pada rumah makan/restoran yang menyajikan makanan khas dari itik.
2. Produksi telur dan daging itik belum mampu memenuhi permintaan kan telur dan daging itik di Aceh.

(c) Kelembagaan Kemitraan

1. Belum berkembangnya kelembagaan kemitraan itik baik di tingkat peternak, industri pengolahan, asosiasi peternakan maupun kelembagaan pemasaran itik
2. Pola kemitraan berupa pola dagang umum sehingga belum menyentuh aspek teknis dan permasalahan peternak dan usaha peternakan itik.

D.2 Peluang Pengembangan Peternakan Itik Di Kabupaten Aceh Utara

1. Adanya program Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Aceh Utara untuk mengembangkan produksi dan distribusi itik di wilayah pesisir Aceh.
2. Usaha berternak itik telah dilakukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara meskipun dalam skala kecil dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala besar.
3. Manajemen pengelolaan itik relatif lebih mudah.
4. Tingginya permintaan itik dan telur itik pada tingkat konsumen, industri rumah tangga, dan rumah makan/restoran yang menyajikan menu masakan khas itik.

5.4 Analisis Lingkungan

Dalam rangka pengembangan peternakan rakyat di Aceh, maka perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk merumuskan kebijakan pengembangan peternakan rakyat berdasarkan isu strategis dalam rangka mengantisipasi perubahan pada masa mendatang. Berdasarkan hasil *desk research* dan pengalaman empiris, serta hasil diskusi dengan *para stakeholder*, maka hasil analisis situasi lingkungan diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal pengembangan peternakan rakyat di Aceh dibagi dalam aspek kekuatan dan kelemahan. Secara rinci hasil analisis lingkungan internal diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2 Analisis Lingkungan Internal berdasarkan Kekuatan Pengembangan Peternakan Rakyat

No	Uraian	Bobot	Rating	Skore
1	Tersedianya lahan setiap rumah tangga	0,333	5,000	1,667
2	Tersedianya tenaga kerja dalam keluarga	0,083	5,000	0,417
3	Peternak memiliki pengalaman yang cukup	0,167	4,000	0,667
4	Peternak memiliki waktu yang cukup	0,167	4,000	0,667
5	Masyarakat sangat respon mengembangkan Ternak	0,167	4,000	0,667
6	Adanya tradisi <i>meugang</i> bagi masyarakat Aceh.	0,083	4,000	0,333
		1,000		4,417

Tabel 5.3 Analisis Lingkungan Internal berdasarkan Kelemahan Pengembangan Peternakan Rakyat

No	Uraian	Bobot	Rating	Skore
1	Peternak kurang memahami kesehatan ternak	0,400	4,000	1,600
2	Adanya persaingan yang tidak sehat diantara pedagang	0,100	3,000	0,300
3	Usaha peternakan bersifat usaha sampingan dan belum dilakukan secara intensif	0,100	3,000	0,300
4	Kurangnya modal bagi peternak dan pedagang	0,200	3,000	0,600
5	Pakan konsentrat ternak di datangkan dari luar daerah	0,200	3,000	0,600
		1,000		3.400

Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal pengembangan peternakan rakyat dibagi dalam aspek peluang dan ancaman. Secara rinci hasil analisis lingkungan eksternal diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4 Analisis Lingkungan Eksternal berdasarkan Peluang Pengembangan Peternakan Rakyat

No	Uraian	Bobot	Rating	Skore
----	--------	-------	--------	-------

1	Potensi sumberdaya peternakan dan iklim sangat mendukung	0,125	5,000	0,625
2	Ketersediaan pakan alami dan limbah rumah tangga	0,125	4,000	0,500
3	Adanya program inseminasi buatan (IB) untuk menjamin tersedianya sapi jantan bakalan yang bermutu baik.	0,125	4,000	0,500
4	Adanya pasar hewan dan pasar daging	0,063	5,000	0,313
5	Adanya industri pengolahan	0,125	3,000	0,375
6	Tingginya permintaan daging dan telur setiap tahunnya sehingga harga daging di Aceh relatif tinggi dibanding daerah lainnya.	0,250	5,000	1,250
7	Adanya poskeswan dan mantri hewan	0,125	2,000	0,250
8	Adanya lembaga penyanggah dana baik dari pemerintah maupun swasta (Bank, koperasi dan LSM).	0,063	3,000	0,188
		1,000		4,000

Tabel 5.5 Analisis Lingkungan Eksternal berdasarkan Ancaman Pengembangan Peternakan Rakyat

No	Uraian	Bobot	Rating	Skore
1	Kurangnya petugas penyuluh kesehatan ternak	0,250	3,000	0,750
2	Tingginya resiko kematian ternak akibat penyakit	0,250	3,000	0,750
3	Tingginya harga pakan ternak	0,250	3,000	0,750
4	Obat-obatan, vitamin ternak di datangkan dari	0,250	3,000	0,750

No	Uraian	Bobot	Rating	Skore
	luar daerah			
		1,000		3,000

5.5 Posisi dan Strategi Pengembangan Peternakan Rakyat di Aceh

Berdasarkan hasil analisis lingkungan tersebut, maka dapat dibuat posisi strategi pengembangan peternakan rakyat di Aceh.

Tabel 5.6 Posisi Pengembangan Peternakan Rakyat

Analisis Lingkungan	Skor
Skore Kekuatan	4,42
Skore Kelemahan	-3,4
Selisih Kekuatan-kelemahan	1,02
Skore Peluang	4
Skore Ancaman	-3
Selisih Peluang-Ancaman	1

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan perolehan nilai skore kekuatan, skore kelemahan, skore peluang dan skore ancaman, maka posisi strategi pengembangan peternakan rakyat di Aceh secara grafis, digambarkan sebagai berikut :

Untuk itu, usaha pengembangan peternakan rakyat di Aceh harus dikembangkan bukan lagi sebagai usaha sampingan tetapi secara komersial sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan.

5.6 Kebijakan dan program pengembangan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal berbasis peternakan

Kebijakan pengembangan peternakan rakyat di Aceh meliputi kebijakan produksi, kebijakan penguatan kelembagaan dalam rantai pasok, dan kebijakan pengolahan produk (industri peternakan). Kebijakan tersebut dapat diwujudkan jika kebijakan dan program yang diterapkan mendapat dukungan dari stakeholder peternakan baik peternak, pemerintah dan pelaku bisnis peternakan serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung bisnis peternakan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya : (1) Memperkuat kelembagaan peternakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan, (2) Perencanaan dan pengaturan produksi dan mengembangkan wilayah pemasaran ternak dan produk ternak, (3) Membangun dan memperkuat agroindustri yang menggunakan bahan baku ternak melalui kemudahan perizinan, pengamanan/jaminan pasokan bahan baku yang kontinue dari ternak lokal, dan membangun kawasan agroindustri terpadu pada wilayah basis ternak, (4) Pembangunan infrastruktur pada wilayah basis peternakan, terutama pasar hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), Klinik Hewan, Lahan basis ternak, Koperasi peternakan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Peternakan, dan Badan Pengawasan Ternak Daerah, (5) Pendampingan dan pembinaan yang kontinue oleh Dinas Peternakan Daerah, PPL Peternakan, Mantri Hewan, dan Dokter Hewan, (6) Konsolidasi Kelompok peternak dan industri peternakan baik aspek manajemen, permodalan, dan pengembangan usaha, dan (7) Pengembangan sistem informasi pasar dan harga, baik di tingkat produksi maupun pemasaran.

(1) Membangun kelembagaan kemitraan terpadu

Sistem manajemen dan keorganisasian usaha agribisnis di daerah sentra produksi masih lemah. Hal ini menunjukkan pemahaman organisasi produksi di daerah sentra produksi belum menyeluruh sehingga jaringan usaha agribisnis belum terpadu sesuai dengan azas-azas kemitraan kelembagaan agribisnis. Organisasi petani belum menggambarkan satu kesatuan yang bersinegri dengan jaringan agribisnis kemitraan. Konsekuensinya adalah terbentuknya pola-pola kemitraan atau kerjasama usaha yang saling tidak membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan karena adanya pelanggaran kerjasama diantara pihak-pihak yang bermitra.. Penguatan kelembagaan peternakan yang meliputi kelompok peternak, pedagang, Klinik Hewan, Pemerintah, dan Agroindustri peternakan perlu mendapat perhatian khusus karena dapat memacu peningkatan produksi ternak dan produk ternak yang berdaya saing dalam bentuk kemitraan yang sinergi dan strategis serta saling menguntungkan. Kelompok peternak mendapatkan kepastian harga dari produk ternaknya, pelayanan kesehatan ternak dan bantuan kredit untuk pengembangan ternak. Pedagang dan Agroindustri mendapat kepastian pasokan ternak dan pemasaran produk olahan ternak. Untuk itu, diperlukan informasi tentang keunggulan dan kelemahan calon mitra, membangun strategi atau mekanisme dalam bermitra, mengimplementasikannya serta mengadakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan target yang diharapkan. Pemerintah Daerah melalui lembaga terkait dapat menjadi motivator pihak yang bermitra dengan mengedepankan program dan kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya kemitraan dalam kelembagaan peternakan.

(2) Perencanaan dan pengaturan produksi dan mengembangkan wilayah pemasaran ternak dan produk ternak

Perencanaan dan pengaturan produksi diarahkan sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat dan kebutuhan industri olahan serta hendaknya berorientasi ekspor. Aceh memiliki peluang untuk ekspor ternak

jika program pemurnian sapi lokal Aceh yang digalakkan oleh pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan mengembangkan kawasan basis ternak Di Aceh. Sebagai contoh, kualitas daging sapi Aceh lebih baik dibanding daging sapi impor, hanya saja jumlah produksinya yang masih terbatas sehingga promosinya kurang dan hanya dikenal oleh masyarakat Aceh. Pengembangan peternakan unggas khususnya ayam baik ayam pedaging dan petelur terbukti dapat dikembangkan di Aceh karena tingginya tingkat permintaan daging dan telur ayam setiap tahun di Aceh. Namun keterbatasan dana menyebabkan peternak Aceh hanya dapat menjalankan usaha peternakan melalui bantuan dana dan kerjasama dengan perusahaan pakan ternak yang berada di Propinsi Sumatera Utara.

Industri peternakan dapat memenuhi pasokan daging sapi lokal Aceh dengan kualitas dan harga yang murah. Program pengembangan produksi juga ditujukan untuk menekan tingginya harga daging di Aceh yang menyebabkan industri peternakan lebih memilih menggunakan daging impor juga ditujukan untuk menekan tingginya harga daging di Aceh yang menyebabkan industri peternakan lebih memilih menggunakan daging impor. Program pengembangan produksi dengan mengedepankan teknologi pengembangan bibit sapi lokal Aceh diharapkan dapat mengurangi permintaan daging dan ternak impor khususnya sapi. Dalam hal ini, Badan Pengawasan Ternak Daerah dapat memonitor arus impor ternak dan daging.

(3) Membangun dan memperkuat agroindustri berbahan baku ternak

Membangun dan memperkuat agroindustri berbahan baku ternak dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan, pengamanan/jaminan pasokan bahan baku yang kontinue dari ternak lokal, dan membangun kawasan agroindustri terpadu pada wilayah basis ternak. Untuk itu, Pemerintah dapat membuat kebijakan penggunaan daging sapi lokal Aceh di tingkat industri olahan. Kebijakan ini dapat diterapkan jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan pasokan daging di Aceh dan mampu menekan kenaikan harga daging di Aceh

Produk olahan daging di Aceh berupa dendeng sapi, bakso, siomay, dan kerupuk kulit. Sejauh ini, kulit sapi dijual ke Medan dalam bentuk mentah.

Keterbatasan agroindustri olahan menyebabkan sebagian besar daging dikonsumsi dalam bentuk segar, sedangkan kulitnya dijual ke medan.

(3) Pembangunan infrastruktur pada wilayah basis peternakan

Ketersediaan infrastruktur peternakan di Aceh seperti pasar hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) dan poskeswan (pos kesehatan hewan) masih sangat terbatas, sehingga pemasaran ternak sering dilakukan di lokasi ternak yang menyebabkan daya tawar peternak relatif rendah. Saat ini pemerintah daerah telah mengembangkan lahan budidaya rumput untuk pakan ternak.

Ke depan, diharapkan Aceh telah memiliki klinik hewan di kawasan basis ternak, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Peternakan, Pabrik pakan ternak dan Badan Pengawasan Ternak Aceh, serta terbentuknya kawasan basis ternak pada daerah sentra produksi ternak. Kelancaran arus ternak dari kelompok peternak hingga ke perusahaan mitra sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur alat pengangkutan dan jalan serta lembaga penampung hasil ternak berupa koperasi peternak dan sejenisnya.

(4) Pendampingan dan pembinaan yang continue oleh Staf Ahli Peternakan

Kelompok peternak dengan segala keterbatasannya memerlukan dukungan dari pihak pemerintah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan di bidang peternakan. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan dan pembinaan yang continue oleh staf ahli peternakan diantaranya Dinas Peternakan Daerah, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) Peternakan, Balai Penelitian Peternakan, Mantri Hewan, dan Dokter Hewan di tiap kawasan basis ternak.

Transformasi teknologi dapat berjalan jika terjalin hubungan yang sinergi antara kelompok peternak dengan staf ahli peternakan, sehingga masalah kesehatan ternak dapat diatasi di tingkat peternak sehingga dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit dan wabah yang mematikan. Diharapkan pemerintah melalui lembaga terkait dapat memberi dukungan

dengan sepenuh hati kepada kelompok peternak sehingga dapat mengembangkan daya saing peternakan Aceh.

(5) Konsolidasi Kelompok peternak dan industri peternakan baik aspek manajemen, permodalan, dan pengembangan usaha

Lemahnya struktur organisasi peternak menyebabkan upaya peningkatan produksi ternak yang sinergi dengan permintaan konsumen dan industri peternakan tidak dapat diwujudkan. Pemerintah melalui dinas terkait khususnya Kementerian Koperasi dapat melakukan konsolidasi kelompok ternak dan industri peternakan baik dari aspek manajemen, permodalan, dan pengembangan usaha azas adil dan merata pada kelompok peternak serta mewujudkan program diversifikasi pangan berbahan baku ternak pada tingkat industri peternakan.

(6) Pengembangan sistem informasi pasar dan harga, baik di tingkat produksi maupun pemasaran

Pengembangan sistem informasi dalam kelembagaan kemitraan peternakan meliputi informasi tentang sistem pengadaan, distribusi, harga input dan output, serta hubungan antar sub sistem dalam agribisnis peternakan yang transparan dan mudah diakses oleh peternak maupun pelaku bisnis peternakan baik di daerah basis produksi, pasar input dan output serta industri peternakan. Pengadaan dan pengembangan pusat pelayanan data dan informasi di masing-masing kelembagaan kemitraan akan meningkatkan efektifitas kinerja kelembagaan kemitraan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena mudahnya akses informasi, sebagai contoh ; informasi harga input, harga output, peluang pasar (jalur pemasaran), peluang produksi, permintaan pasar konsumen, permintaan di tingkat industri pengolahan, penyakit dan cara pengendalian penyakit, teknologi pengembangan produksi dan pengolahan, akses kredit, dan masalah lain dibidang peternakan.

Arah pengembangan peternakan rakyat di Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.7 Tahap Pengembangan Peternakan Rakyat

Subsistem	Tahap		
	Embrio	Penumbuhan	Pengembangan
Pengembangan Ternak	Pembentukan kelompok ternak per desa	Pembentukan asosiasi peternak	Pembinaan asosiasi peternak
	Bantuan bibit & kandang ternak	Kredit bergulir	Kredit komersial untuk pengembangan ternak
	Pengelolaan ternak secara kelompok pada daerah sentra produksi	Pendampingan pengelolaan ternak secara kelompok	Pengembangan pengelolaan pada daerah lain
	Penambahan petugas penyuluh dan tenaga ahli peternakan	Pengembangan kader tenaga ahli peternakan di kecamatan	Masyarakat sudah mampu melakukan sendiri
	Introduksi rumput gajah dalam skala desa	Pembudidayaan rumput gajah dalam skala luas	Intensifikasi rumput gajah dalam skala luas
	Bantuan alat penggiling pakan bagi kelompok ternak	Aplikasi teknologi pembuatan pakan konsentrat skala desa/kelompok	Pengembangan teknologi pembuatan pakan konsentrat secara luas/komersil

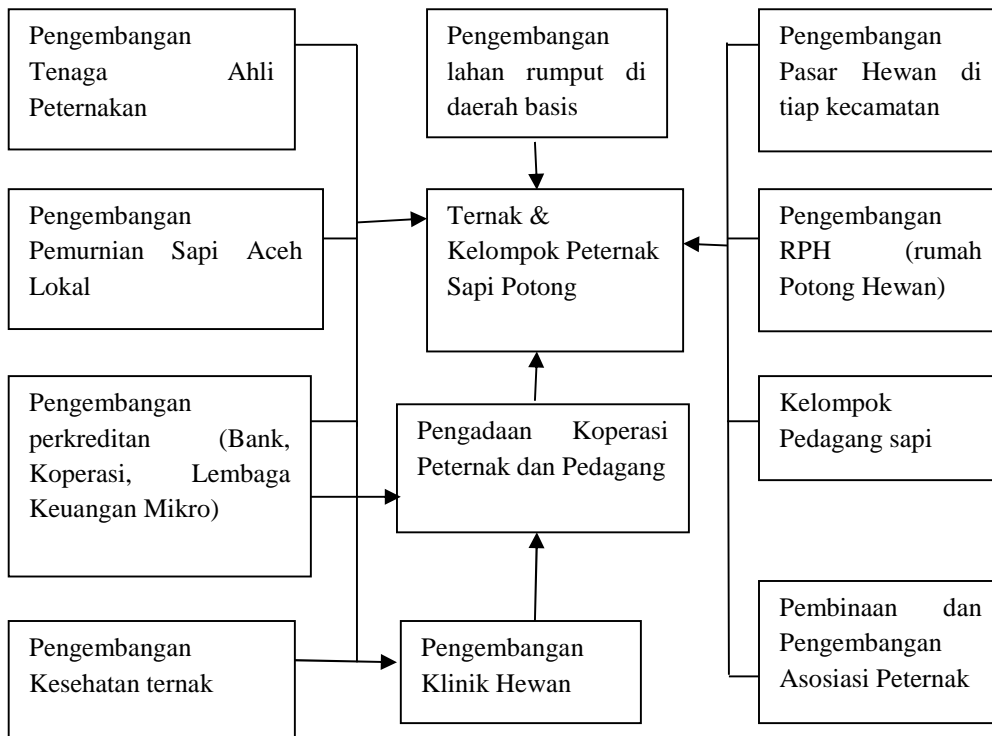
	Pembentukan kelompok Pertanian organik	Penumbuhan pertanian organik	Pengembangan pertanian organik
	Introduksi teknologi kompos	Pendirian usaha kompos	Pendirian usaha kompos
	Pendirian agroindustri konsentrat	Penumbuhan agroindustri pakan konsentrat	Pengembangan agroindustri pakan konsentrat dijual diluar daerah
	Introduksi agroindustri	Penumbuhan agroindustri berbahan baku daging dan telur	Pengembangan Agroindustri berbahan baku daging dan telur
	Pengadaan pasar hewan di tiap kecamatan	Pengadaan pasar hewan di tiap kecamatan	Ekspor sapi pada daerah lain
Agroindustri Bisnis	Rintisan Rumah Potong Hewan	Penumbuhan RPH (Rumah Potong Hewan)	Pengembangan RPH (Rumah Potong Hewan)
	Rintisan klinik hewan	Penumbuhan klinik hewan di daerah basis	Pengembangan klinik hewan di daerah basis
	Rintisan Kawasan Agroindustri Terpadu berbahan baku daging dan telur	Penumbuhan Kawasan Agroindustri Terpadu berbahan baku daging dan telur	Pengembangan Kawasan Agroindustri Terpadu berbahan baku daging dan telur

5.7 Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Rakyat yang Berdaya Saing

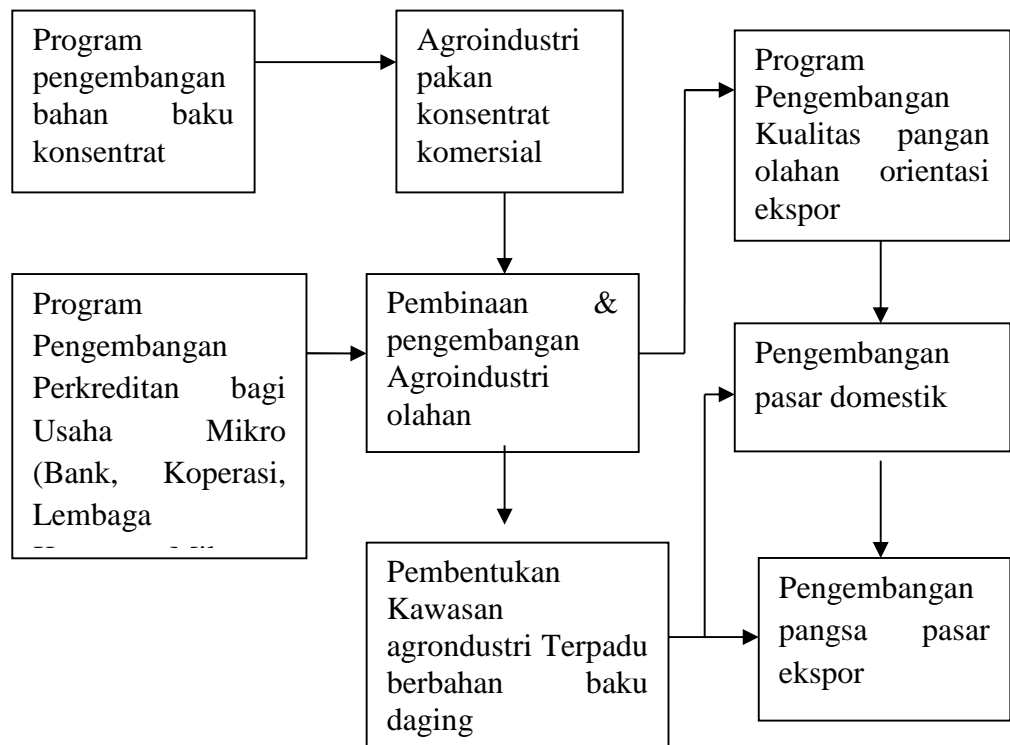
Model pengembangan kelembagaan peternakan direkomendasikan untuk dikembangkan dengan berdasar struktur kelembagaan kemitraan peternakan yang telah terbentuk di Aceh dan usulan pengembangan yang dapat dilakukan dengan menilik ketersediaan sumberdaya serta kebutuhan kelembagaan dengan berpijak dari berbagai permasalahan yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Untuk itu, model ini akan dikembangkan pada masing-masing usaha peternakan yang diteliti, yang meliputi usaha peternakan sapi, usaha peternakan ayam petelur, usaha peternakan ayam pedaging, dan usaha peternakan itik.

5.7.1 Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Sapi

----- Pengembangan Ternak & Kelompok Peternak -----



----- Pengembangan Agroindustri Bisnis -----



5.7.2 Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging

5.7.3 Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Petelur

5.7.4 Model Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan Itik

BAB 11

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- a. Program pengembangan usaha peternakan sapi Aceh di Kabupaten Aceh Besar telah dikembangkan di sejumlah kecamatan melalui kegiatan pemurnian bibit sapi Aceh dan pengembangan usaha peternakan sapi potong. Hal ini terlihat dengan bertambahnya bantuan bibit sapi Aceh kepada sejumlah kelompok peternak, mesin pemotong/penghancur pakan, pemberian vaksinasi, inseminasi buatan dan pengembangan lahan rumput untuk pakan hijauan. Meskipun demikian usaha peternakan ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, lemahnya manajemen peternak, kurangnya sanitasi kandang, terbatasnya pakan hijauan di saat musim kemarau, dan permintaan industri olahan masih didominasi oleh daging sapi impor.
- b. Usaha peternakan ayam petelur yang digalakkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung berhenti. Sejumlah kandang terlihat kosong karena peternak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan akibat tingginya harga pakan dan harga daging yang cenderung berfluktuasi.
- c. Usaha peternakan ayam pedaging di Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh usaha kemitraan antara peternak dengan perusahaan inti. Hal ini menunjukkan bahwa peternak tidak mampu mengantisipasi kenaikan harga pakan dan usaha peternakan ayam potong membutuhkan modal yang besar dan resiko yang tinggi terhadap serangan penyakit. Program

- bantuan bibit ayam (DOC) dan pakan yang digalakkan pemerintah juga kurang berjalan dengan baik karena peternak hanya mengusahakan ayam sesuai dengan bantuan pakan yang tersedia, selanjutnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan ayam sendiri, maka ayam tersebut langsung dijual meskipun belum pada masa panen.
- d. Usaha peternakan itik di Kabupaten Aceh Utara sangat potensial untuk dikembangkan mengingat usaha ini tidak membutuhkan modal yang tinggi, harga daging dan telur itik lebih tinggi dibanding harga daging dan telur ayam, serta tingginya permintaan daging dan telur itik di tingkat konsumen, rumah makan/restoran yang menyediakan menu khas itik. Penyebaran ternak itik yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Utara ditujukan untuk nelayan dan masyarakat pesisir pantai.
 - e. Kendala pengembangan usaha peternakan rakyat di Aceh adalah lemahnya permodalan, tingginya harga pakan dan kurangnya pabrik pakan konsentrat, manajemen usaha yang tidak terstruktur, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi sehingga pemasaran umumnya dilakukan di lokasi ternak, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari dinas terkait, adanya masalah sosial dari dampak usaha peternakan bagi masyarakat sekitar, lokasi ternak umumnya hanya memanfaatkan lahan pekarangan rumah, kurang terorganisir, kurangnya akses pasar dan informasi harga, dan masalah kepastian hukum dan keamanan yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diusulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a. Usaha peternakan rakyat di Aceh membutuhkan sentuhan teknologi dan keberpihakan pemerintah dan swasta dalam menyediakan bibit berkualitas, ketersediaan pabrik pakan di lingkungan peternakan untuk mengantisipasi kenaikan harga pakan, pengembangan organisasi peternak

(kelompok peternak, asosiasi peternak), akses pasar dan kelembagaan pasar perlu ditambah sesuai dengan wilayah pengembangan peternakan, peningkatan peran penyuluh, petugas inseminasi buatan, tenaga medis peternakan. Hal ini dapat dilakukan melalui usaha peternakan rakyat bersistem kemitraan secara terpadu dan berkelanjutan dan peran aktif organisasi peternak.

- b. Hendaknya pemerintah Aceh dapat mengupayakan pengadaan dan pengembangan industri pakan olahan mengingat 70% modal peternakan ditentukan oleh harga pakan. Pengadaan industri pakan olahan sangat membantu peternak dalam memenuhi kebutuhan pakan bagi ternak dan mengantisipasi tingginya kenaikan harga pakan.
- c. Perlunya pengawasan terhadap masuknya daging dan sapi impor ke Aceh, mengingat tingginya permintaan daging sapi impor di tingkat industri. Dalam hal ini program swasembada daging melalui program pengembangan sapi lokal Aceh perlu dikembangkan lagi agar kedepan kebutuhan daging sapi oleh industri olahan dapat dipenuhi dari daging sapi Aceh.

Ringkasan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model kemitraan rantai pasok dan rantai nilai usaha peternakan rakyat serta pola pengembangan peternakan rakyat dalam konteks pembangunan ekonomi lokal berbasis peternakan di Aceh. Tujuan khusus penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil tujuan penelitian tahun pertama yaitu mengkaji kendala dan peluang pengembangan kemitraan antara peternak dengan pelaku bisnis, memformulasikan model kemitraan peternakan rakyat dalam konteks penguatan ekonomi lokal, dan memberikan alternatif kebijakan pengembangan peternakan secara terpadu dan berdaya saing serta layak dikembangkan di Aceh.

Evaluasi kinerja program pengembangan peternakan dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan informasi dari peternak, pelaku bisnis dan pemerintah daerah serta data-data sekunder yang relevan. Melalui analisis SWOT dapat diidentifikasi faktor internal dan eksternal pada kelembagaan kemitraan usaha peternakan rakyat mencakup analisis rantai pasok dan analisis rantai nilai dengan tinjauan pada aspek sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran produk ternak rakyat. guna menemukan strategi pengembangan sebagai dasar merumuskan model kemitraan dan alternatif kebijakan pengembangan kemitraan yang layak dikembangkan di Aceh.

Hasil penelitian tahun pertama memberikan informasi bahwa usaha peternakan rakyat di Aceh terbentuk secara sinergi pada beberapa pola kemitraan baik pada aspek penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran. Meskipun pola tersebut menciptakan peluang

pengembangan peternakan di tingkat peternak, namun masih dihadapi beberapa kendala dan tantangan dalam pengembangannya sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan model kemitraan yang layak diterapkan di Aceh melalui analisis simulasi.

Keberadaan kelembagaan lokal seperti Rumah Potong Hewan (RPH), asosiasi peternakan, pasar hewan, pos kesehatan hewan di tingkat kecamatan dan pasar daging tradisional khususnya pada usaha peternakan sapi potong cukup signifikan dan berkontribusi positif sehingga mampu mengurangi praktek-praktek pemasaran yang tidak fair yang dapat merugikan peternak sapi potong. Namun hal ini belum berlaku bagi usaha peternakan yang lain di Aceh.

Usaha peternakan ayam petelur binaan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur tidak berjalan dengan baik, bahkan sejumlah kandang terlihat kosong karena peternak tidak mampu mengantisipasi kenaikan harga pakan dan fluktuasinya harga telur ayam, kurangnya pembinaan dari instansi terkait dan manajemen pengelolaan yang tidak terstruktur. Prospek pasar telur ayam menunjukkan bahwa permintaan telur ayam masih sepenuhnya dipasok dari Provinsi Sumatera Utara.

Usaha peternakan ayam broiler berkembang dengan pola kemitraan dan mampu memenuhi 80% dari permintaan daging ayam. Usaha peternakan itik memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan secara mandiri karena kenaikan harga telur itik mampu mengantisipasi kenaikan harga pakan, pola makan itik yang jauh lebih sedikit dan bebas berinteraksi dengan lingkungan dapat meringankan modal usaha.

Daftar Pustaka

- Azhar dan Syamni Ghazali, 2010. Beberapa Masalah yang Perlu Dipahami oleh Pengusaha Kecil Di Indonesia. Seminar & Work Shop Nasional: The International Competitiveness of Indonesia's Organizations in the Dynamic Global Environment. Faculty Economic and Management,IPB, Bogor, 2010.
- Aziz, A. M, 1993. Strategi Operasional Pengembangan Agroindustri Sapi Potong. Prosiding Agroindustri Sapi Potong. CIDES. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat statistik) Aceh. 2008. Aceh dalam angka. Banda Aceh; BPS Provinsi Aceh.
- Diskeswannak Aceh. 2012. Laporan Tahunan. Banda Aceh; Dinas Kesehatan Hewan dan Ternak Aceh.
- Fakhrudin Sidik Riezky. 2013. Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Cihideung Udik abupaten Bogor. Skripsi [tidak dipublikasikan].. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Febyanti, F, 2008. Rencana Impor daging sapi dari Brasil Ditentang. <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2011/12/23/brk,20111223-121431>. Akses tanggal 23 Desember 2011.
- Ilham, N.B.Wiryono, I.K.Kariyoso, M.N.A.Kirom, dan Sri Hastuti, 2001. *Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Peternakan Unggulan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Ikramuddin. 2012. Analisis Determinan Kelangsungan Hidup Usaha Sektor Formal (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. E-Mabis . Vol. 13 Nomor 3, Juli 2012.
- Kaplinsky, R. and M. Moris. 2001. *A Handbook for Value Chain research*. Brighton, United kingdom, institute of Development Studies. University of Sussex.
- Maryudi dan Ikramuddin. 2011. Pengaruh Strategi Klaster Dinamis Terhadap Peningkatan Daya Saing Industri Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Agribisnis Di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi HIBAH PEKERTI – DIKTI. Lhokseumawe.
- Sarwanto. 2011. Kelayakan Usaha Pembesaran Itik Pedaging (Studi Kasus pada Peternakan Maju Bersama Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi [tidak dipublikasikan].. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sianturi ECJ. 2011. Analisis Kelayakan Usaha Ayam Ras Petelur pada Dian Layer Farm di Desa Sukadamai Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor. Skripsi [tidak dipublikasikan].. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Siregar M, Ilham N. 2003. *Upaya Peningkatan Efisiensi Usaha Ternak Ditinjau dari Aspek Agribisnis yang Berdaya Saing*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Syamni Ghazali dan Ikramuddin. 2014. Model Kemitraan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Usaha Peternakan Rakyat Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Di Aceh. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi HIBAH PEKERTI – DIKTI Tahun 1. Lhokseumawe.
- Uphoff. N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with cases*. Kumarian Press.
- Yusdja, Y. H. Malian, B. Winarso, R. Sayuti, dan A. S Bagyo, 2001. *Analisa Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Peternakan*. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar dan Syamni Ghazali, 2010. Beberapa Masalah yang Perlu Dipahami oleh Pengusaha Kecil Di Indonesia. Seminar & Work Shop Nasional: The International Competitiveness of Indonesia's Organizations in the Dynamic Global Environment. Faculty Economic and Management,IPB, Bogor, 2010.
- Aziz, A. M, 1993. *Strategi Operasional Pengembangan Agroindustri Sapi Potong*. Prosiding Agroindustri Sapi Potong. CIDES. Jakarta.
- BPS (Badan Pusat statistik) Aceh. 2008. Aceh dalam angka. Banda Aceh; BPS Provinsi Aceh.
- Diskeswannak Aceh. 2012. Laporan Tahunan. Banda Aceh; Dinas Kesehatan Hewan dan Ternak Aceh.
- Febyanti, F, 2008. *Rencana Impor daging sapi dari Brasil Ditentang*. <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2011/12/23/brk,20111223-121431>. Akses tanggal 23 Desember 2011.
- Ilham, N.B.Wiryono, I.K.Kariyoso, M.N.A.Kirom, dan Sri Hastuti, 2001. *Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Peternakan Unggulan*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Ikramuddin. 2012. Analisis Determinan Kelangsungan Hidup Usaha Sektor Formal (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. E-Mabis . Vol. 13 Nomor 3, Juli 2012.
- Kaplinsky, R. and M. Moris. 2001. *A Handbook for Value Chain research*. Brighton, United kingdom, institute of Development Studies. University of Sussex.
- Maryudi dan Ikramuddin. 2011. Pengaruh Strategi Klaster Dinamis Terhadap Peningkatan Daya Saing Industri Usaha Kecil Menengah (UKM) Berbasis Agribisnis Di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi HIBAH PEKERTI – DIKTI. Lhokseumawe.
- Syamni Ghazali dan Ikramuddin. 2014. Model Kemitraan Rantai Pasok dan Rantai Nilai Usaha Peternakan Rakyat Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Di Aceh. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi HIBAH PEKERTI – DIKTI Tahun 1. Lhokseumawe.

Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with cases*. Kumarian Press.

Yusdja, Y. H. Malian, B. Winarso, R. Sayuti, dan A. S Bagyo, 2001. *Analisa Kebijakan Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Peternakan*. Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.